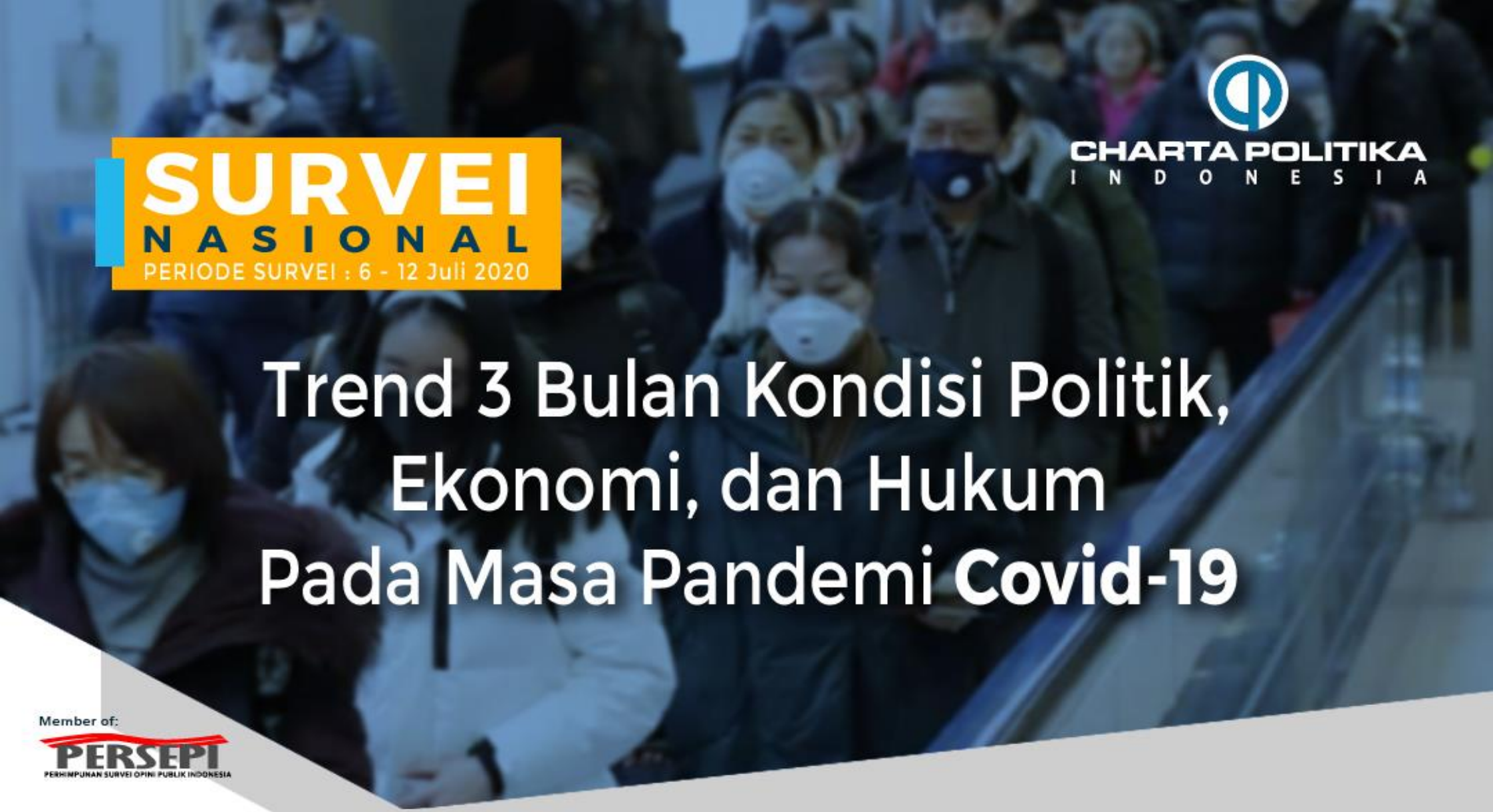


CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL
PERIODE SURVEI : 6 - 12 Juli 2020

Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi **Covid-19**

Member of:
PERSEPI
PERHIMPUNAN SURVEI OPINI PUBLIK INDONESIA

@chartapolitika

www.chartapolitika.com

Pendahuluan

Kriteria	Keterangan
Metode wawancara	Wawancara melalui telepon
Metode sampling	*Simple random sampling*
Jumlah sampel	2000 Responden
Margin of Error	2.19%
Kriteria responden	Min. 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih
Quality control	20% dari total sampel
Wilayah survei	Nasional (PSU: kelurahan/desa)
Periode survei	6 – 12 Juli 2020

Metode Survei

- Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19, kegiatan survei saat ini dilakukan melalui wawancara telepon.

- Sampel sebanyak 2.000 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan oleh Charta Politika Indonesia pada rentang dua tahun terakhir hingga Februari 2020.

- Sebanyak 195.638 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat sekitar 75% memiliki nomor telepon.

- Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon adalah sebanyak 7.500 data, dan yang berhasil diwawancara adalah sebanyak 2.000 responden.

- Menggunakan asumsi simple random sampling, jumlah responden 2.000 memiliki toleransi kesalahan (*margin of error* – MoE) sebesar ±2,19% pada tingkat kepercayaan (*level of confidence*) 95%.

Metode Survei

- Laporan survei kali ini juga menyajikan beberapa data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan Charta Politika Indonesia pada periode 1 – 8 Mei 2020 dan 6 – 13 Juni 2020, masing-masing menggunakan 2.000 responden dengan metode *simple random sampling* (MoE ±2,19%) pada tingkat kepercayaan 95%, untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.

- Survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia secara tatap muka langsung pada 20 – 27 Februari 2020, yang menggunakan 1.200 responden dengan metode *multistage random sampling* (MoE ±2,83%) pada tingkat kepercayaan 95%, juga disertakan sebagai bahan perbandingan persepsi publik sebelum terjadinya pandemi Covid-19.



CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

Profil Responden

Sebaran Responden

No	Provinsi	Sampel	No	Provinsi	Sampel
1	Aceh	2.0	18	Kepulauan Riau	0.5
2	Bali	1.5	19	Lampung	3.0
3	Banten	4.5	20	Maluku	0.5
4	Bengkulu	0.5	21	Maluku Utara	0.5
5	D.I. Yogyakarta	1.5	22	Nusa Tenggara Barat	2.0
6	DKI Jakarta	4.0	23	Nusa Tenggara Timur	2.0
7	Gorontalo	0.5	24	Papua	2.0
8	Jambi	1.5	25	Papua Barat	0.5
9	Jawa Barat	17.0	26	Riau	2.0
10	Jawa Tengah	14.5	27	Sulawesi Barat	0.5
11	Jawa Timur	16.0	28	Sulawesi Selatan	3.0
12	Kalimantan Barat	2.0	29	Sulawesi Tenggara	1.0
13	Kalimantan Selatan	1.5	30	Sulawesi Tengah	1.0
14	Kalimantan Tengah	1.0	31	Sulawesi Utara	1.0
15	Kalimantan Timur	1.5	32	Sumatera Barat	2.0
16	Kalimantan Utara	0.5	33	Sumatera Selatan	3.0
17	Kep. Bangka Belitung	0.5	34	Sumatera Utara	5.0

Profil Responden

NO	Jenis Kelamin	Sampel
1	Laki – Laki	50.0
2	Perempuan	50.0

NO	Usia	Sampel
1	17 - 20 tahun	9.0
2	21 - 35 tahun	46.8
3	36 - 50 tahun	30.2
4	50 tahun lebih	14.1

NO	Agama	Sampel
1	Islam	88.8
2	Protestan	6.9
3	Katolik	3.0
4	Hindu	0.3
5	Lainnya	1.1

NO	Suku	Sampel
1	Jawa	43.2
2	Sunda	16.3
3	Melayu	5.4
4	Betawi	4.5
5	Batak	3.5
6	Madura	2.3
7	Bugis	1.5
8	Minangkabau	1.4
9	Lainnya	22.2



CHARTA POLITIKA
INDONESIA

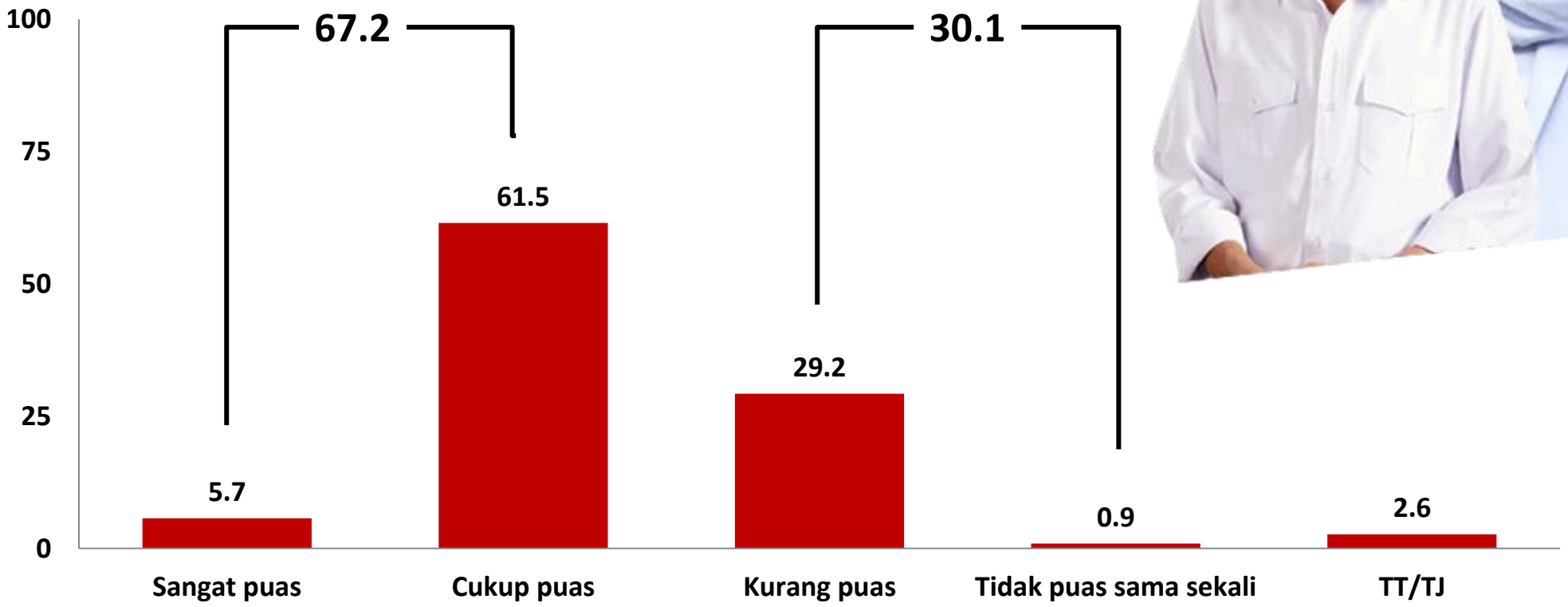
SURVEI
NASIONAL

Kinerja Pemerintahan

Kinerja Pemerintahan Pusat



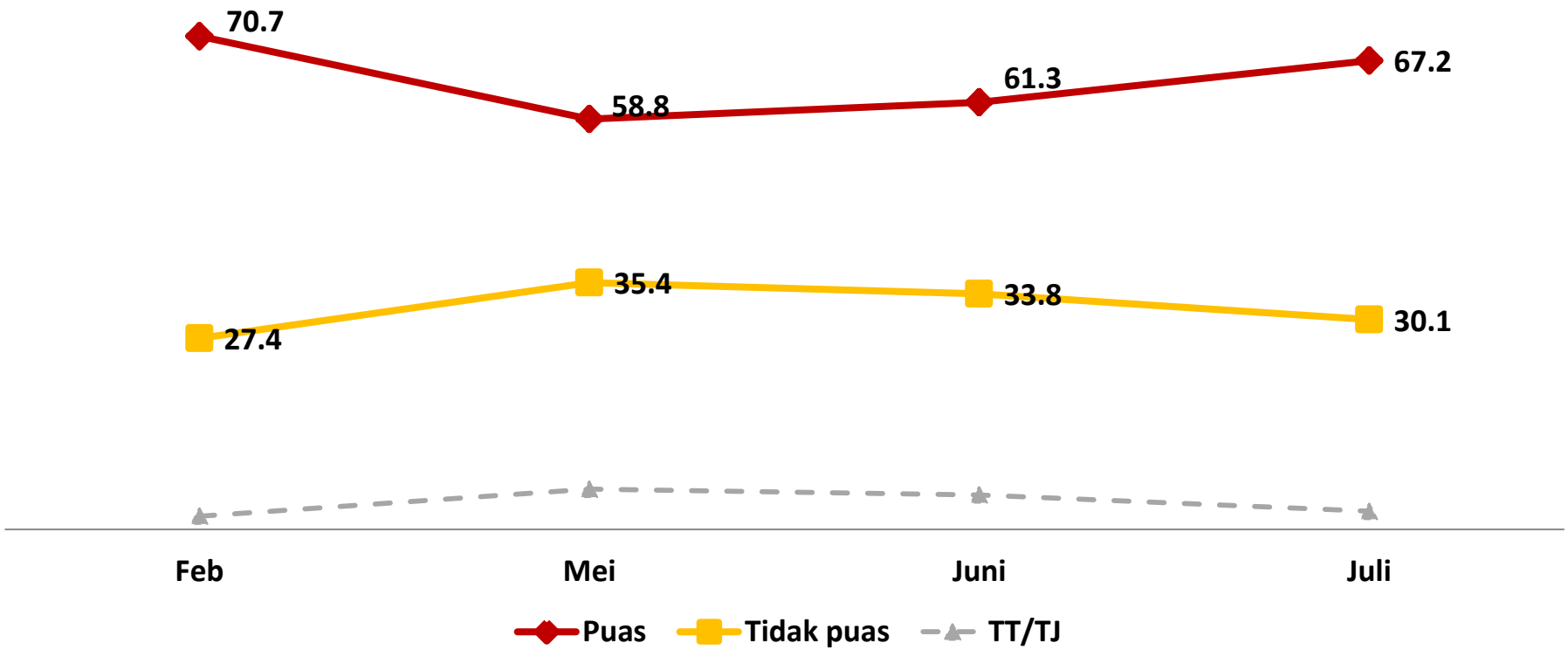
Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali?



Responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan pusat sebanyak 67.2%, sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30.1%.

Trend:

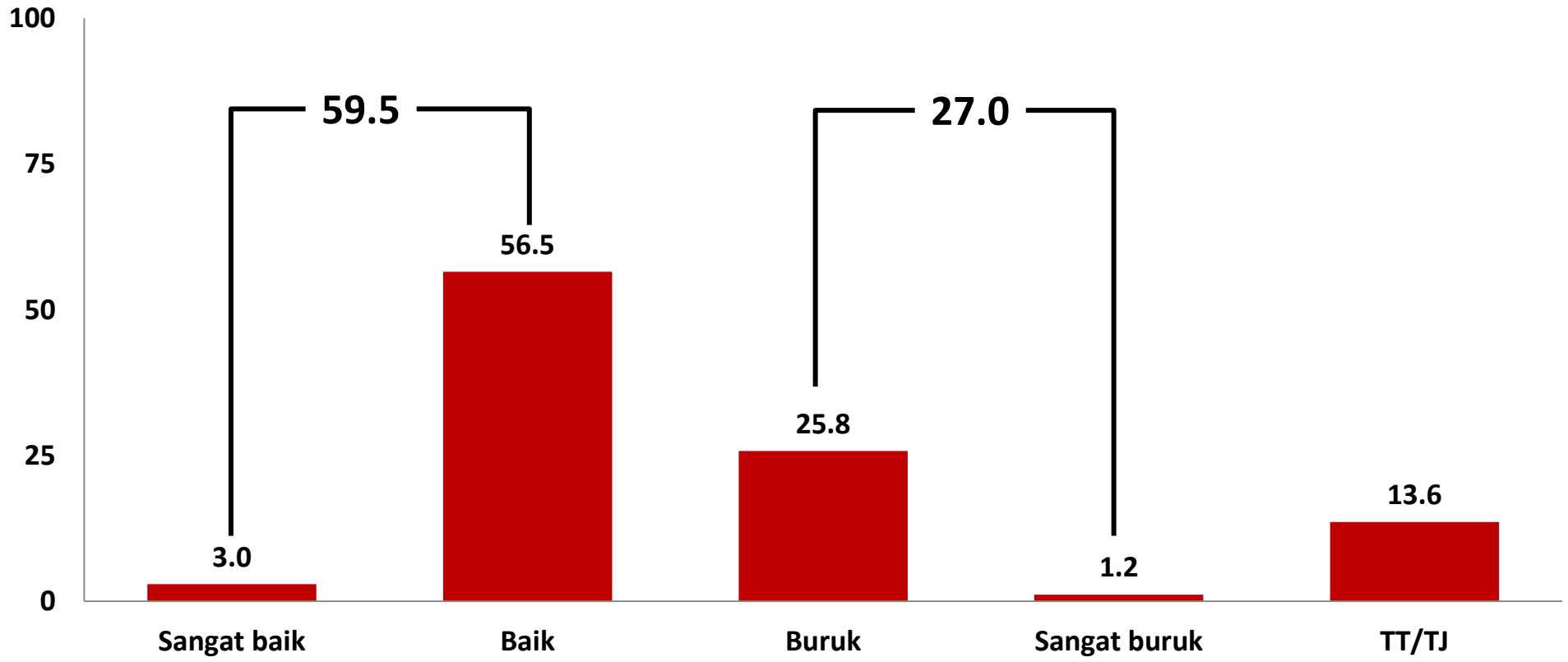
Pilihan terhadap kepuasan kinerja pemerintah



Dilihat dari segi trend, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. Tingkat kepuasan terendah terjadi pada saat bulan Mei.

Kondisi Politik di Indonesia

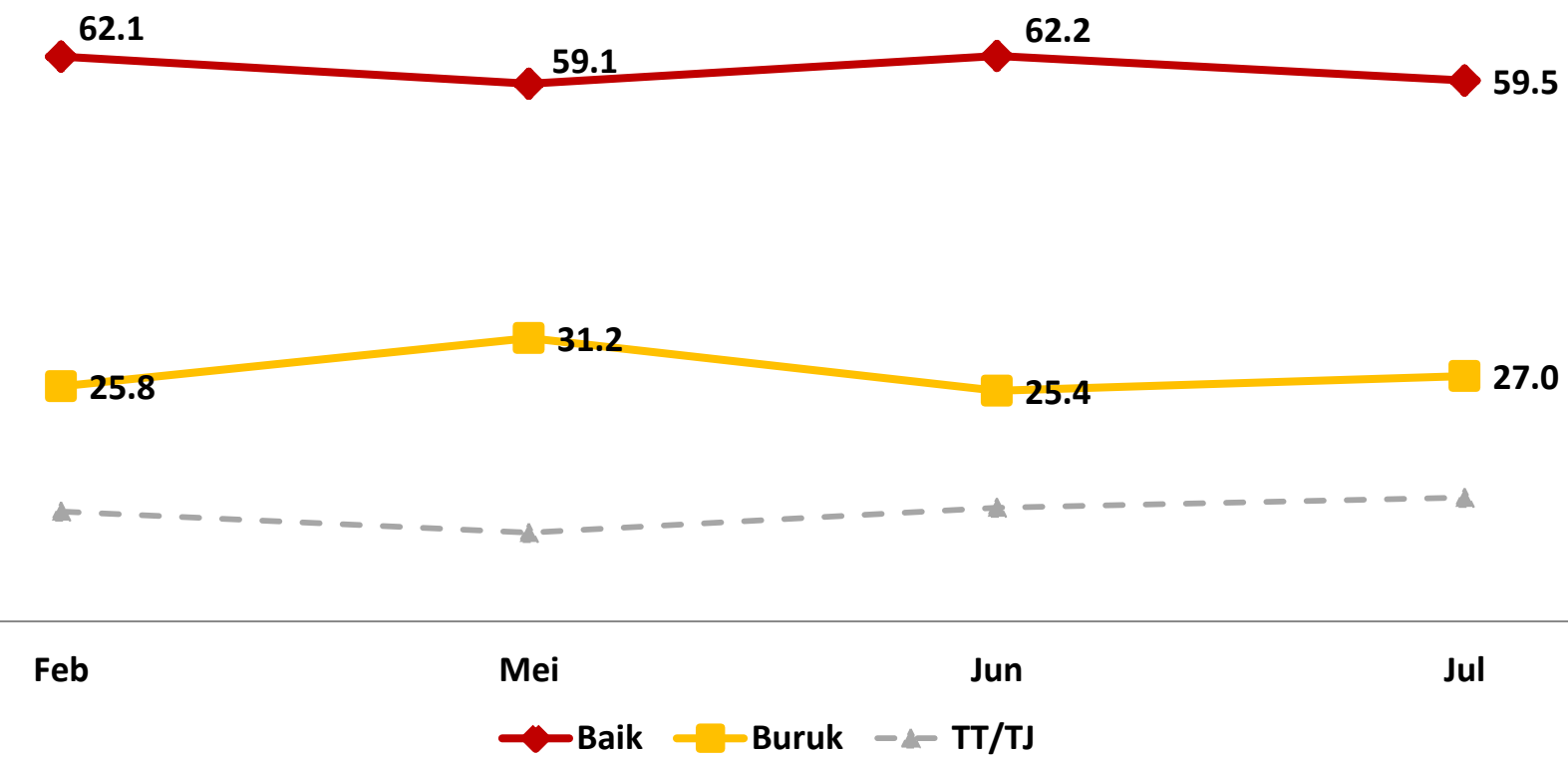
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat keadaan politik nasional saat ini?



Penilaian terhadap kondisi politik saat ini di bawah angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (59.5%).

Trend:
Kondisi Politik di Indonesia

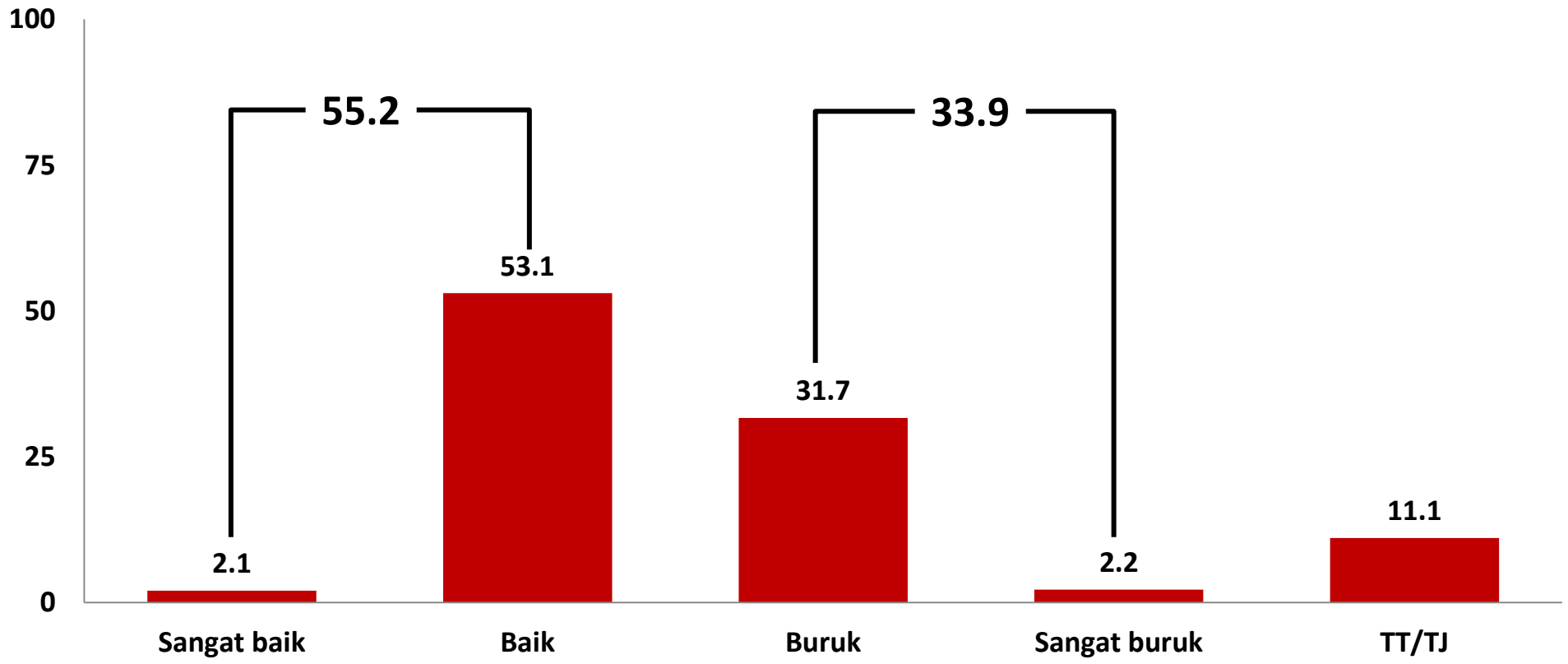
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat keadaan politik nasional saat ini? (Jawaban Sangat Baik + Baik)



Trend penilaian kondisi politik cenderung stagnan, baik pada kondisi pra ataupun masa pandemi Covid-19.

Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia

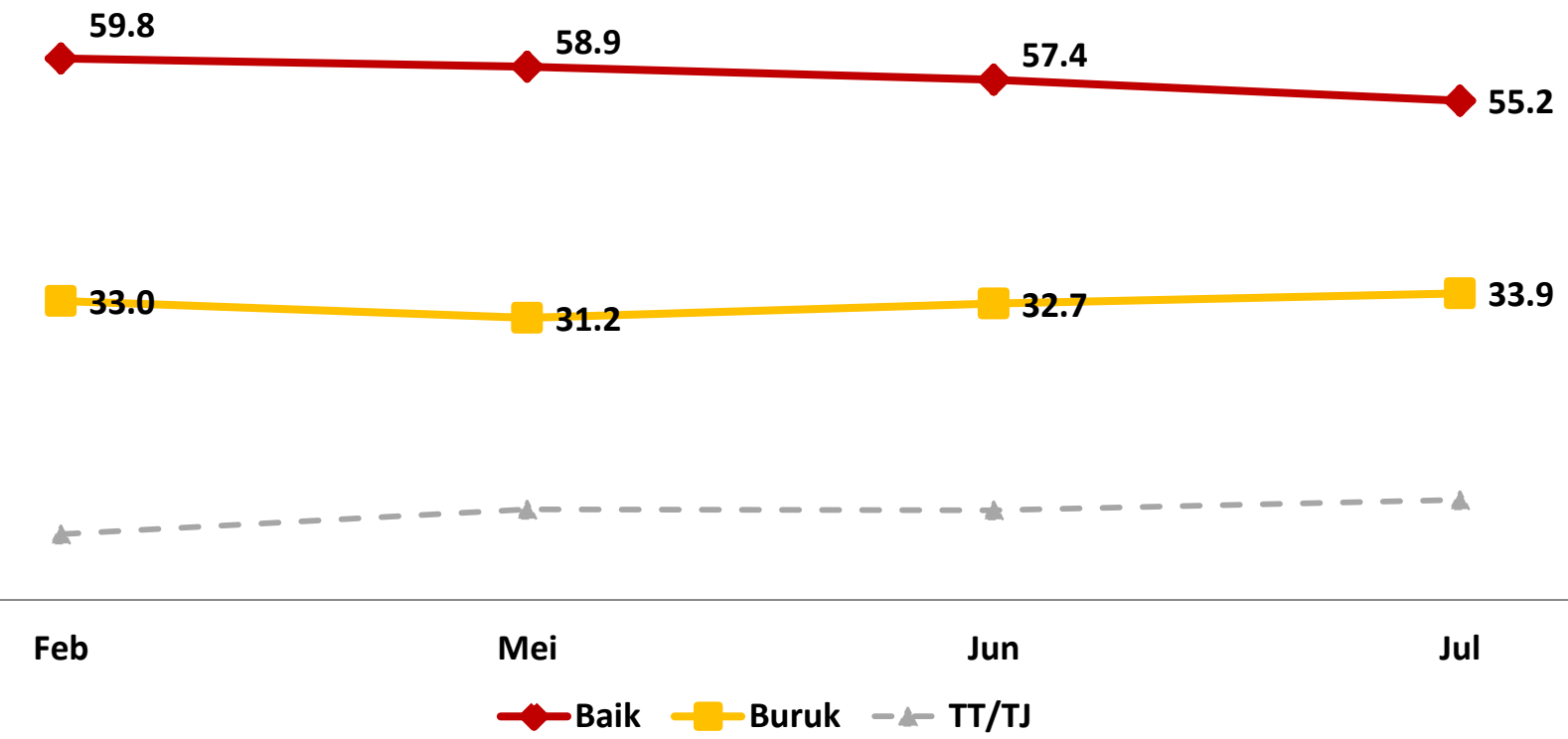
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat keadaan penegakan hukum secara nasional saat ini?



Penilaian kondisi hukum berada di bawah kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum ataupun penilaian terhadap kondisi politik.

Trend:
Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia

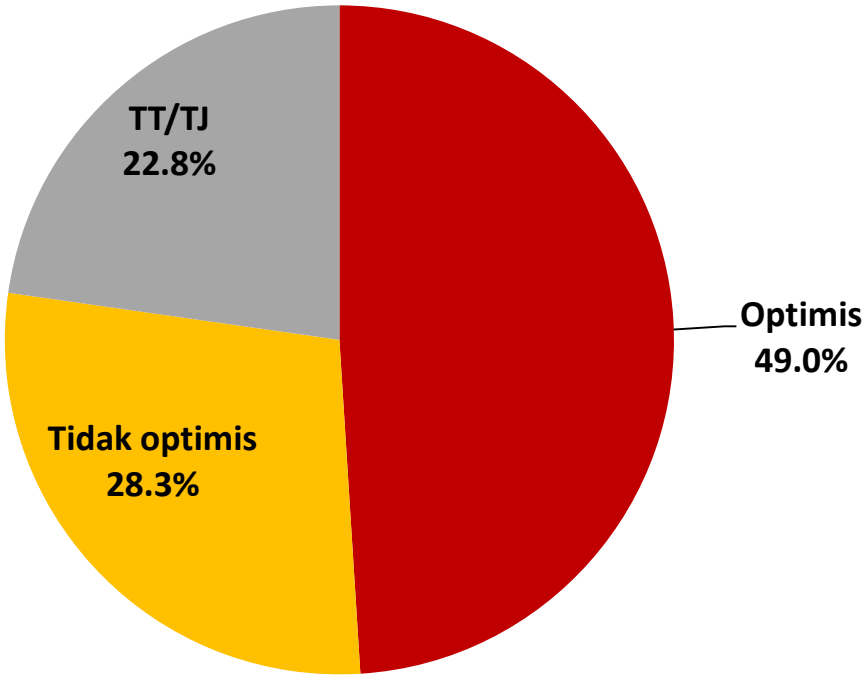
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat keadaan penegakan hukum secara nasional saat ini? (Jawaban Sangat Baik + Baik)



Dari segi trend, penilaian terhadap kondisi penegakan hukum cenderung mengalami penurunan.

Optimisme kondisi ekonomi

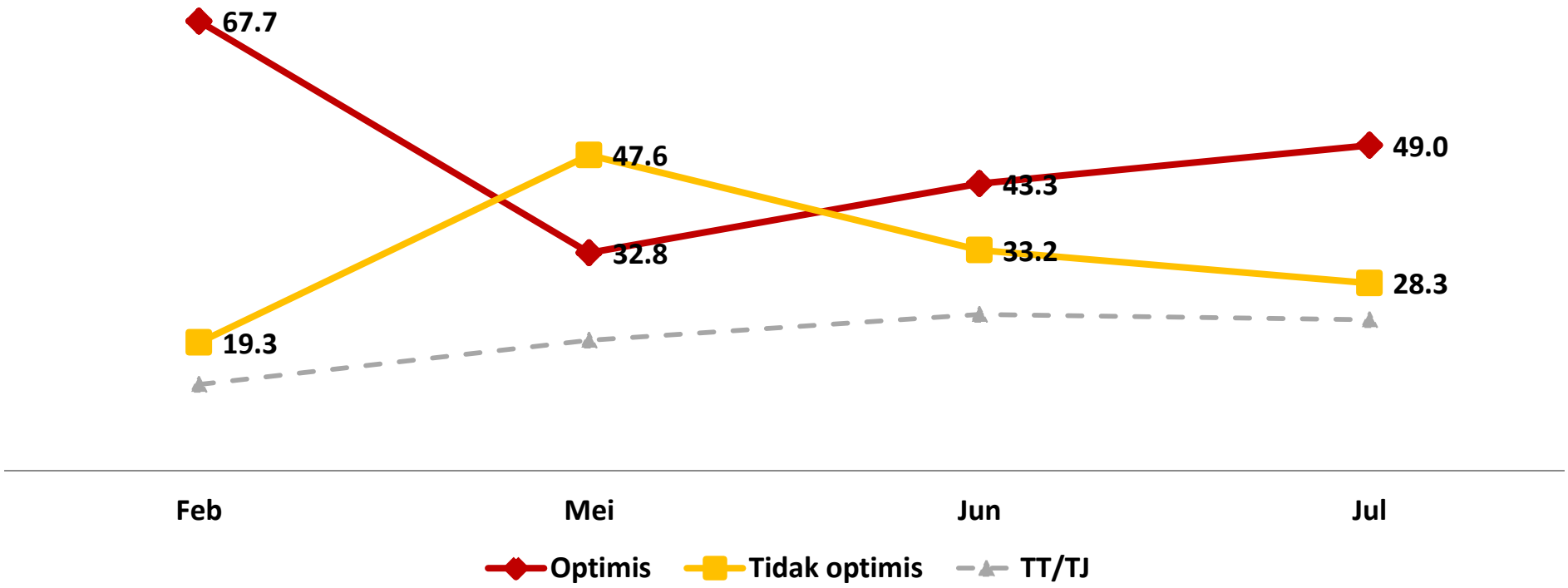
Apakah Bapak/Ibu/Saudara optimis atau tidak optimis akan kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun kedepan?



Lebih banyak (49.0%) yang menyatakan optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun ke depan dibandingkan dengan yang tidak optimis (28.3%).

Trend:
Optimisme kondisi ekonomi

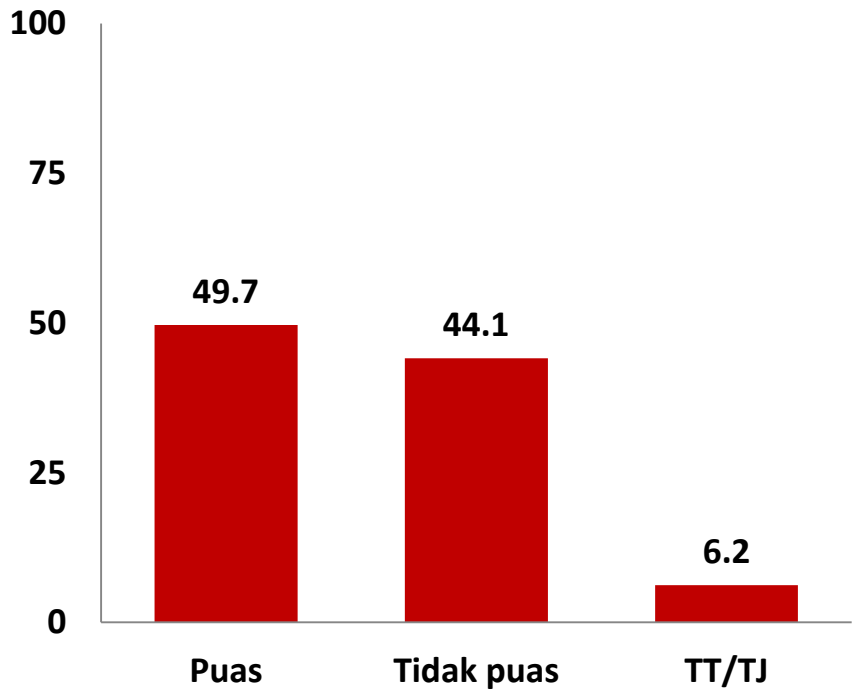
Apakah Bapak/Ibu/Saudara optimis atau tidak optimis akan kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun kedepan?



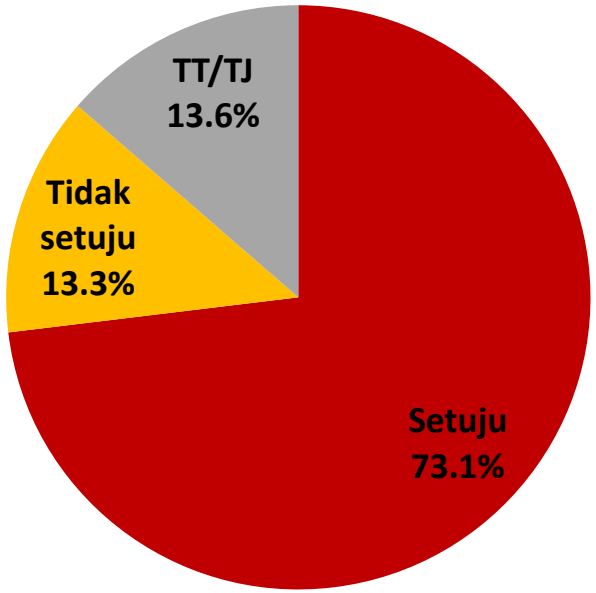
Dilihat dari sisi trend, optimisme responden cenderung meningkat dibandingkan dengan kondisi terburuk pada bulan Mei walaupun masih jauh dari angka optimisme sebelum pandemi Covid-19.

Kabinet Indonesia Maju dan Wacana Reshuffle

Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas atau tidak puas terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024?



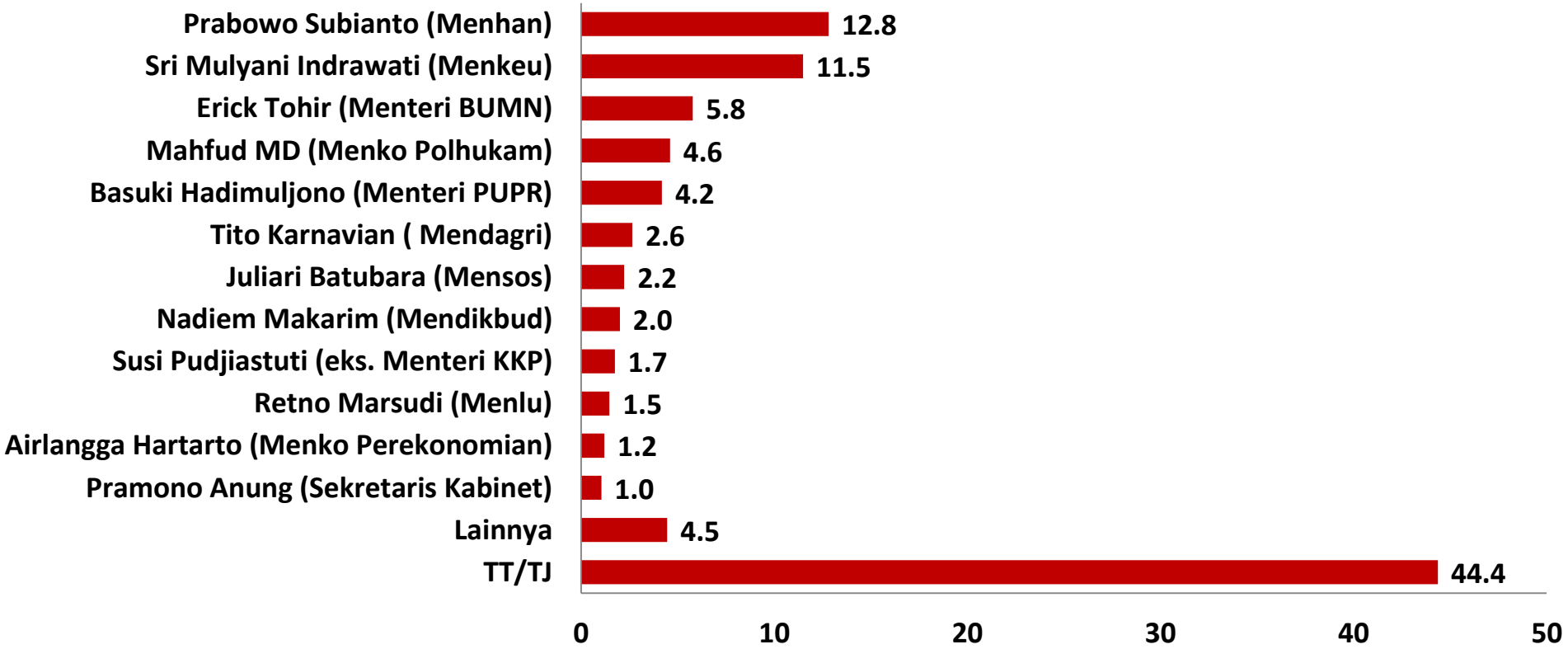
Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju atau tidak setuju terhadap wacana reshuffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024?



Penilaian kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju jauh berada di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Berkaitan dengan wacana *reshuffle* kabinet, mayoritas responden menyatakan setuju.

Menteri berkinerja terbaik (terbuka)

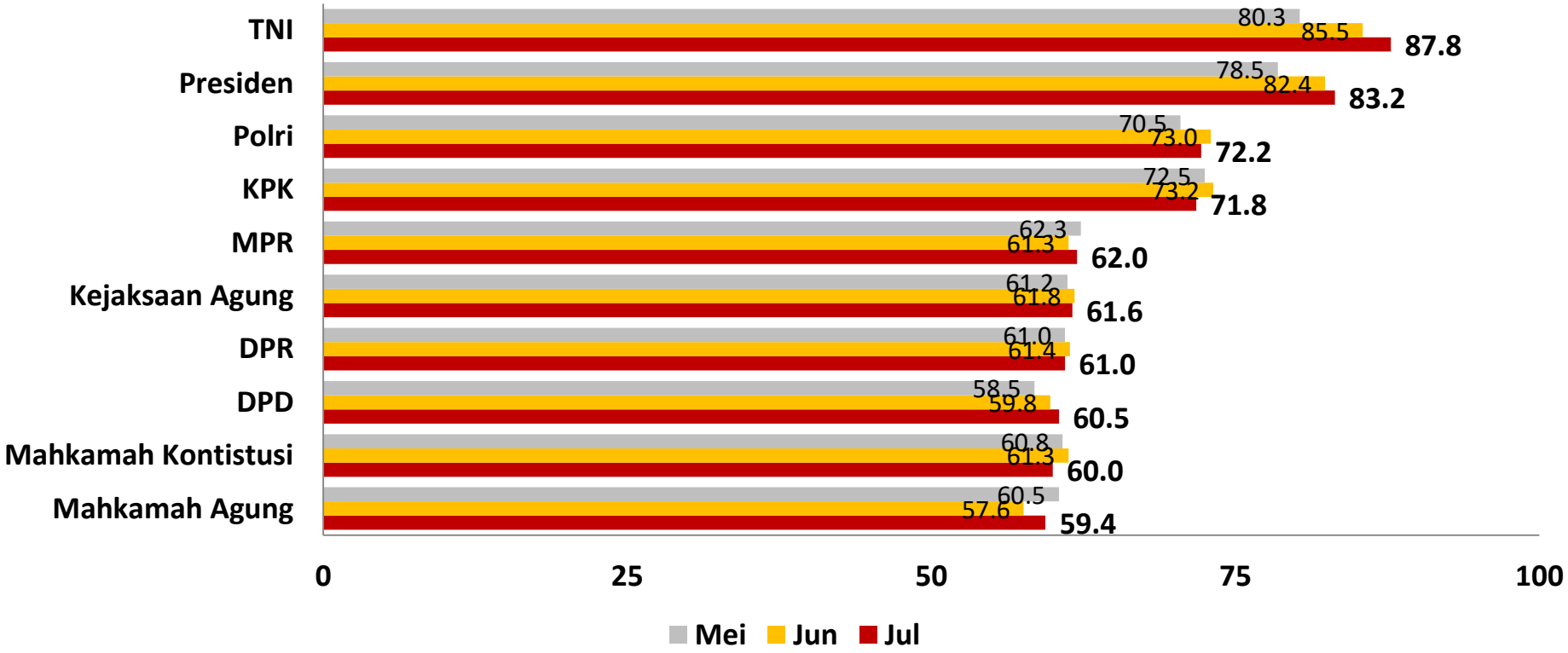
Sebutkan satu nama Menteri Kabinet Indonesia Kerja yang Bapak/Ibu nilai memiliki kinerja terbaik?



Kebanyakan nama-nama yang muncul adalah nama-nama yang memiliki tingkat pengenalan *(awareness)* yang tinggi atau pos kementeriannya mendapatkan sorotan media di saat situasi pandemi Covid-19.

Trend:
Kepercayaan pada Lembaga Tinggi Negara

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara diantara lembaga tinggi negara di bawah ini, apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali? ***[Jawaban sangat percaya + cukup percaya]***



Kepercayaan masyarakat terhadap TNI, Presiden dan DPD terlihat meningkat dibandingkan pada bulan Mei dan Juni, sementara pada Polri, KPK,Kejaksaan Agung,Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Juni.

Temuan 1

- Kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin terlihat meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan pada kinerja pemerintah pusat di bulan Mei dan Juni.

- Penilaian responden terhadap kondisi politik cenderung stagnan, baik pada masa pra ataupun masa pandemi Covid-19. Sementara penilaian terhadap kondisi hukum cenderung mengalami penurunan.

- Optimisme terhadap kondisi ekonomi cenderung meningkat pada masa 3 bulan pandemi Covid-19, meskipun masih jauh dari optimisme sebelum terjadinya pandemi.

- Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, dimana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet.

- Kepercayaan responden terhadap lembaga tinggi negara cukup baik, meskipun pada lembaga-lembaga hukum terlihat sedikit penurunan tingkat kepercayaan dibandingkan dengan bulan Juni.



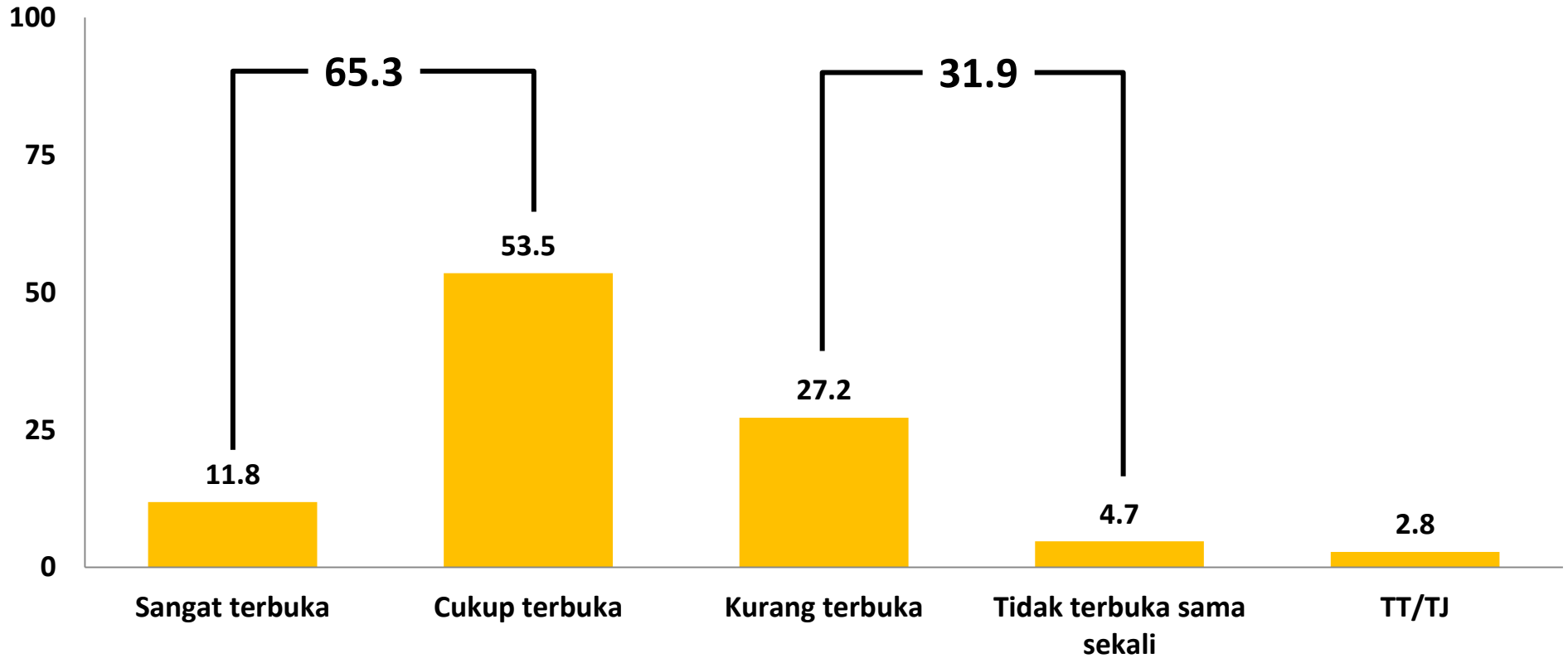
CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

Penanganan COVID-19

Keterbukaan pemerintah terkait Covid-19

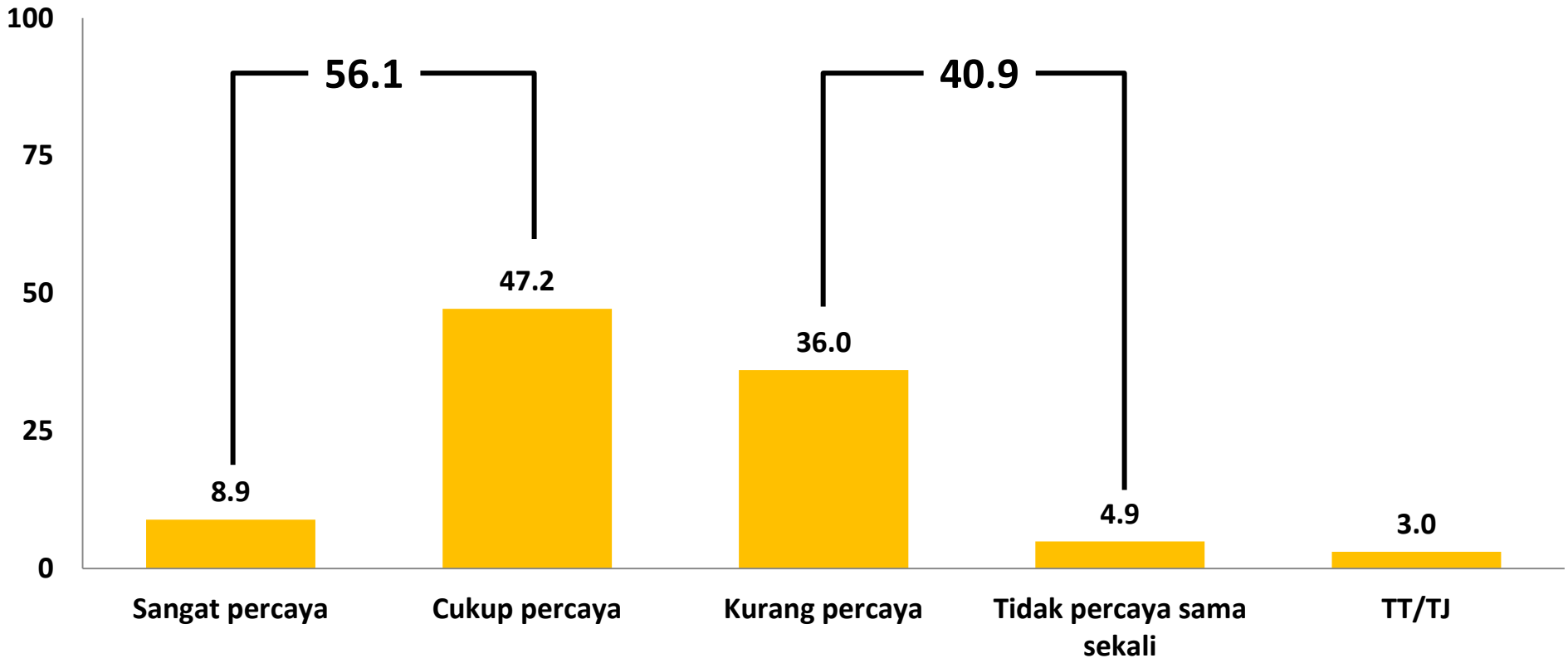
Apakah sejauh ini Pemerintah Pusat terbuka terhadap keadaan sesungguhnya tentang keadaan Covid-19 ini di negara kita? Apakah sangat terbuka, cukup terbuka, kurang terbuka, atau tidak terbuka sama sekali?



Sebanyak 65.3% responden menyatakan pemerintah terbuka tentang keadaan Covid-19. Dan masih ada 31.9% responden yang menyatakan tidak terbuka tentang keadaan Covid-19.

Tingkat kepercayaan data COVID-19 dari Pemerintah

Seberapa percayakah Bapak/Ibu/Saudara dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait kasus pandemi Covid-19 di Indonesia? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?



Sebanyak 56.1% responden menyatakan percaya dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait Covid-19, dan sebanyak 40.9% lainnya menyatakan tidak percaya.

Pilihan terhadap kepercayaan data COVID-19 dari Pemerintah berdasarkan gender dan usia

Seberapa percayakah Bapak/Ibu/Saudara dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait kasus pandemi Covid-19 di Indonesia? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?

Kategori	Base Line	Sangat percaya	Cukup percaya	Kurang percaya	Tidak percaya sama sekali	TT/TJ	Total
		8.9	47.2	36.0	4.9	3.0	100.0
GENDER							
Laki-laki	50.0	8.2	45.5	36.0	6.2	4.1	100.0
Perempuan	50.0	9.5	48.8	36.1	3.6	2.0	100.0
USIA							
17 – 20 tahun	9.0	8.1	41.9	44.9	4.4	0.7	100.0
21 – 35 tahun	46.8	7.6	43.4	39.9	6.4	2.7	100.0
36 – 50 tahun	30.2	9.9	52.2	31.1	3.9	2.9	100.0
50 tahun lebih	14.1	11.3	52.1	28.2	2.3	6.1	100.0

Data Covid-19 yang dirilis oleh pemerintah cenderung lebih dipercaya di kalangan perempuan. Sementara dari segi usia, responden dengan usia semakin tua memiliki kecenderungan semakin percaya pada data yang dirilis oleh pemerintah.

Pilihan terhadap kepercayaan data COVID-19 dari Pemerintah berdasarkan pendidikan

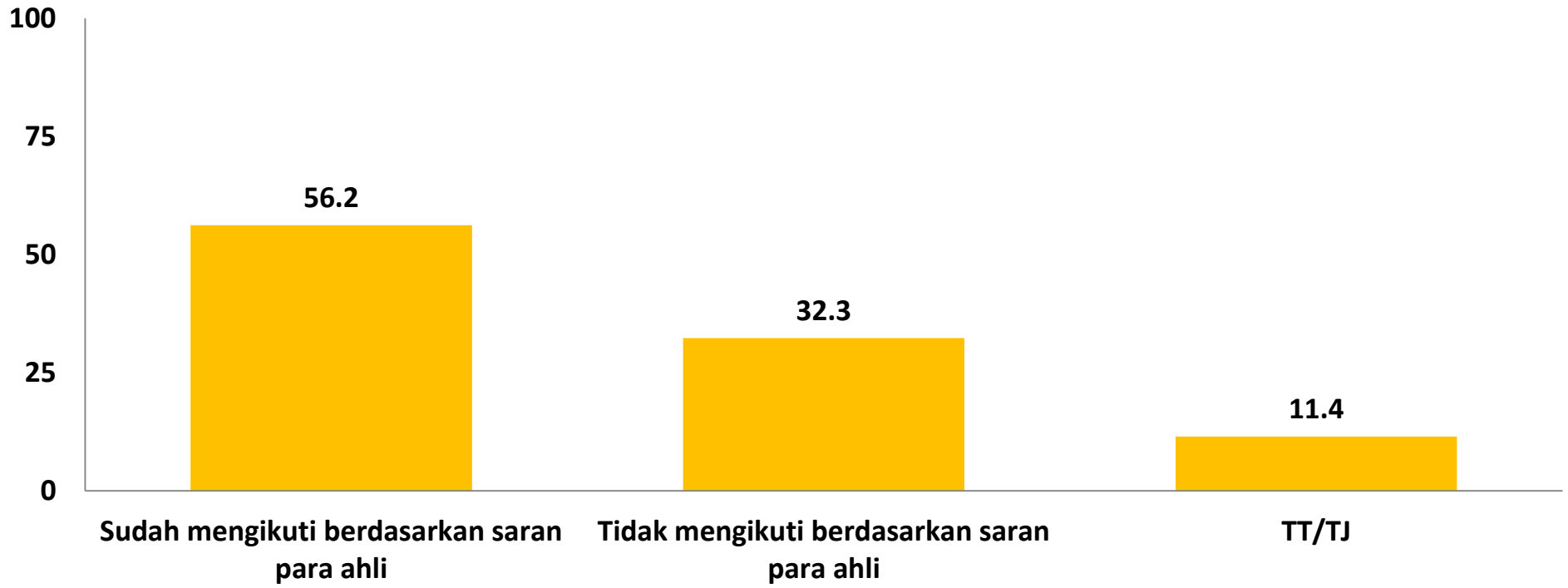
Seberapa percayakah Bapak/Ibu/Saudara dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait kasus pandemi Covid-19 di Indonesia? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?

Kategori	Base Line	Sangat percaya	Cukup percaya	Kurang percaya	Tidak percaya sama sekali	TT/TJ	Total
		8.9	47.2	36.0	4.9	3.0	100.0
PENDIDIKAN							
Tidak pernah sekolah	1.1	12.5	37.5	37.5	0.0	12.5	100.0
Tidak tamat SD	1.2	5.6	38.9	33.3	22.2	0.0	100.0
Tamat SD	9.1	15.2	58.0	23.9	0.7	2.2	100.0
Tidak tamat SLTP	1.1	5.9	47.1	41.2	5.9	0.0	100.0
Tamat SLTP	13.7	14.0	52.7	26.6	3.9	2.9	100.0
Tidak tamat SLTA	4.6	10.0	51.4	35.7	0.0	2.9	100.0
Tamat SLTA	44.2	8.5	44.7	36.9	6.9	3.0	100.0
Tidak tamat perguruan tinggi/masih mahasiswa	5.2	6.3	36.7	57.0	0.0	0.0	100.0
Tamat D3/diploma	3.4	2.0	39.2	52.9	2.0	3.9	100.0
Tamat S1 atau lebih tinggi	14.0	4.2	49.5	39.6	5.7	0.9	100.0
TT/TJ	2.3	2.9	40.0	28.6	2.9	25.7	100.0

Responden dengan tingkat pendidikan tamat SD tercatat cenderung mempercayai data Covid-19 dari pemerintah. Di sisi lain, segmen dengan angka ketidak percayaan paling tinggi adalah responden dengan tingkat pendidikan tidak tamat perguruan tinggi/masih mahasiswa.

Penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan saran para ahli

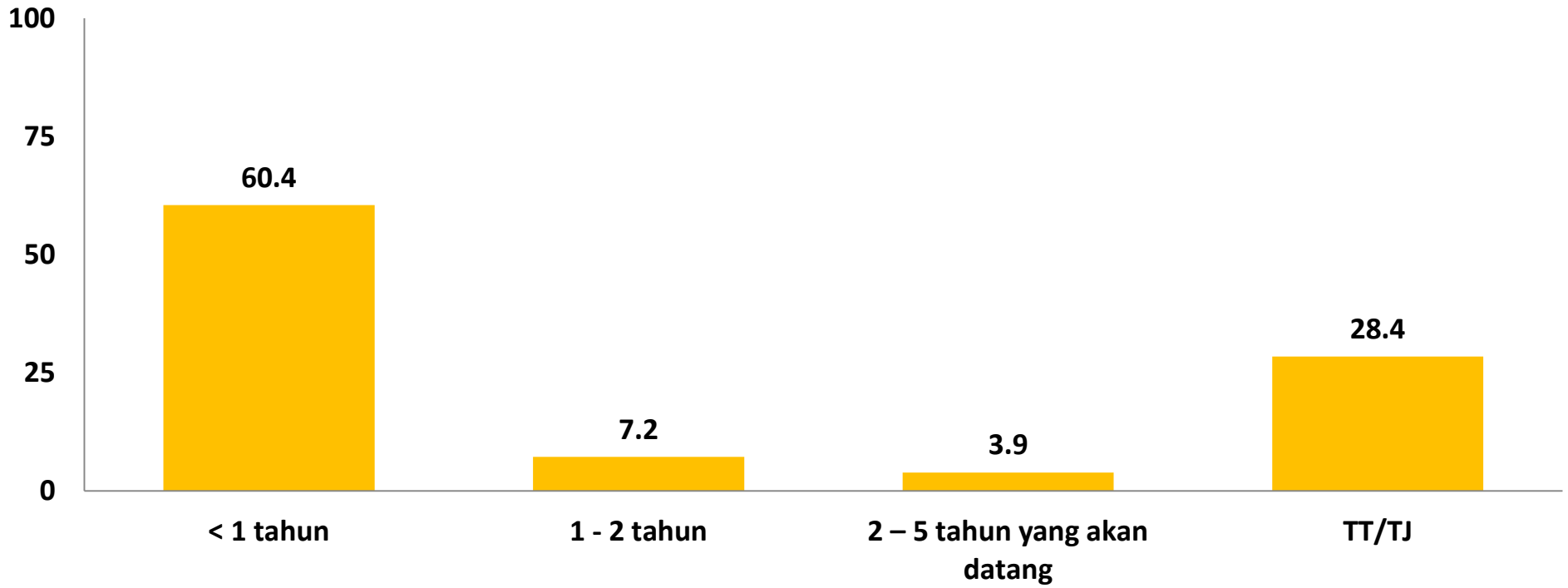
Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berdasarkan saran atau tidak berdasarkan saran para ahli?



Lebih banyak responden menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sesuai mengikuti saran para ahli (56.2%) walaupun masih terdapat 32.3% responden yang menyatakan penanganan pandemi tidak mengikuti berdasarkan saran para ahli.

Perkiraan jangka waktu pandemi COVID-19

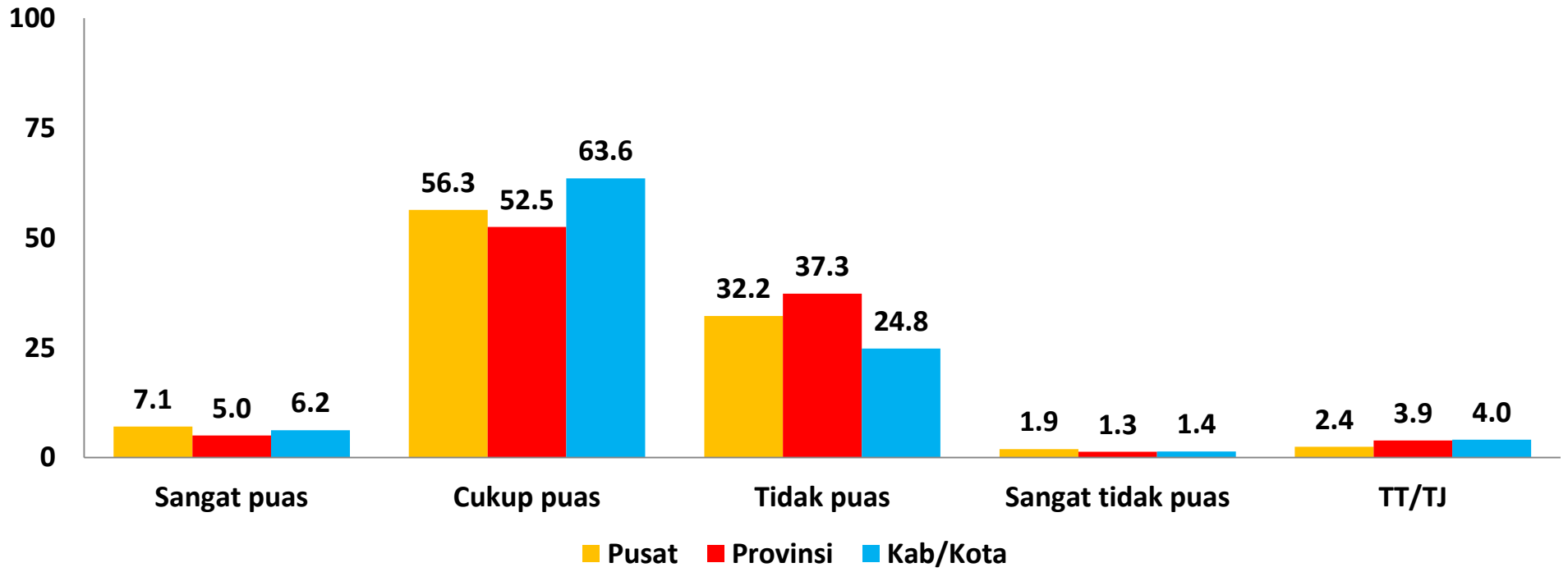
Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara dalam jangka waktu berapa lama pandemi Covid-19 ini akan berakhir?



Mayoritas responden menilai secara optimis bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Optimisme ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat belum adanya kepastian terkait kapan vaksin ditemukan.

Kinerja Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota dalam menangani pandemi Covid-19

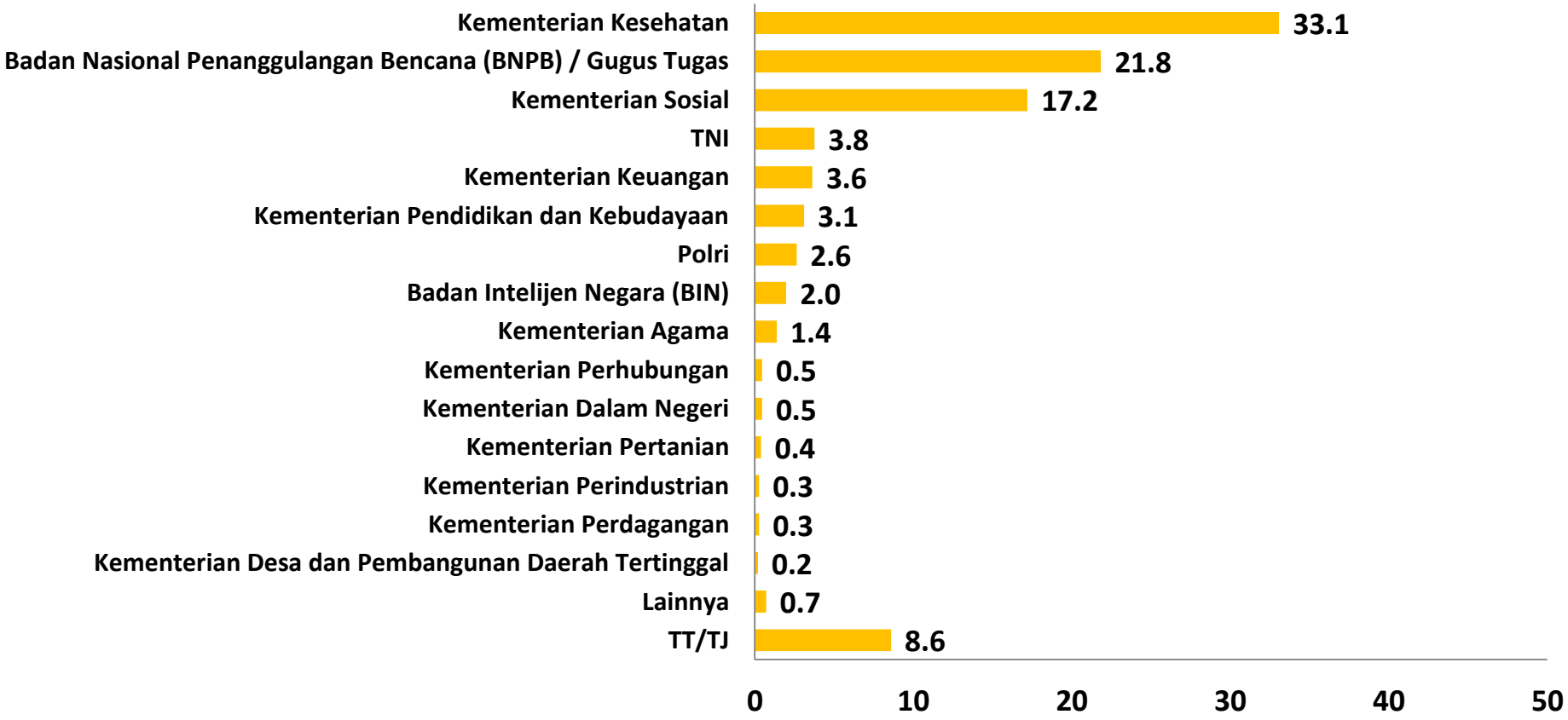
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana penanganan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota menangani masalah Covid-19 ini? Apakah sangat puas, cukup puas, tidak puas, atau sangat tidak puas?



Pemerintah Provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kementerian/Lembaga Tinggi Negara paling aktif di masa pandemi Covid-19 (Terbuka)

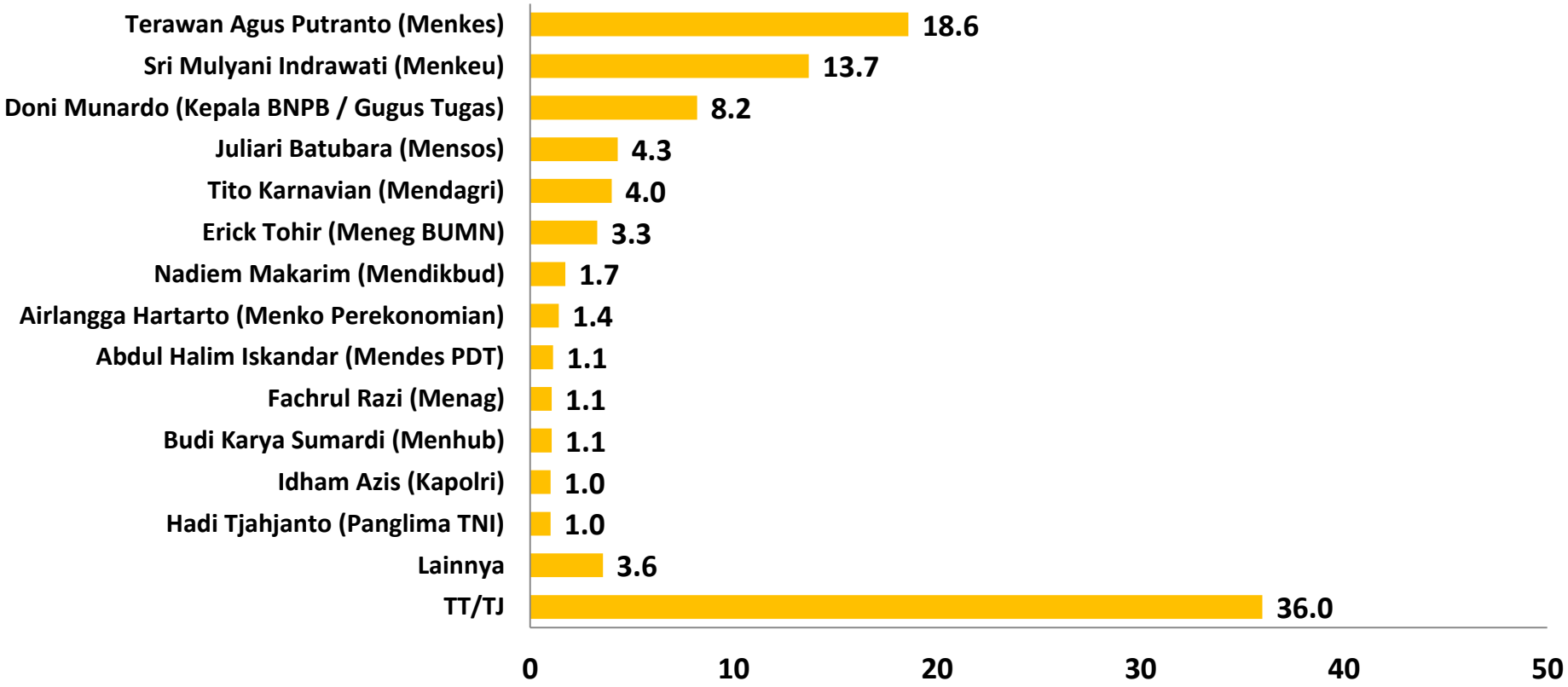
Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara kementerian atau lembaga tinggi negara manakah yang paling aktif/berperan besar bagi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 saat ini?



Kementerian Kesehatan, BNPB / Gugus Tugas, dan Kementerian Sosial dinilai sebagai lembaga yang paling aktif dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

Menteri/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara paling sering terlihat dan/atau terdengar di masa pandemi COVID-19 (Terbuka)

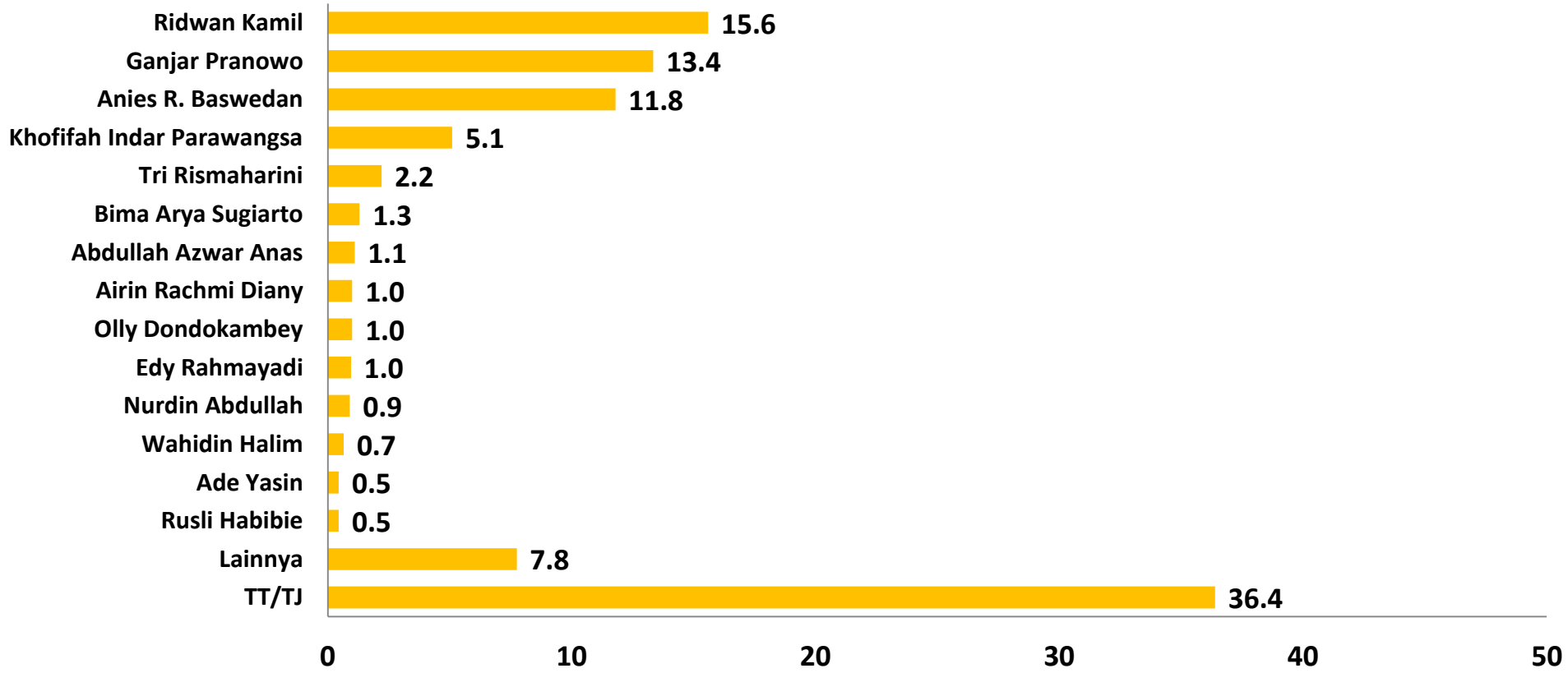
Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapakah menteri / pimpinan lembaga tinggi negara yang paling sering terlihat dan/atau terdengar dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini?



Terawan Agus Putranto, Sri Mulyani Indrawati, Doni Munardo, Juliari Batubara dan Tito Karnavian masuk sebagai lima besar nama menteri/pimpinan lembaga tinggi negara yang paling sering terlihat dan/atau terdengar dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini menarik apabila dikaitkan dengan temuan kinerja menteri terbaik (hal. 19), yang tidak memunculkan nama Terawan Agus Putranto.

Kepala Daerah berkinerja terbaik (Terbuka)

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapakah Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang memiliki kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19?



Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies R. Baswedan adalah kepala daerah tertinggi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19 pada level *top of mind*.

Temuan 2

- Masyarakat cukup mengapresiasi keterbukaan pemerintah terkait Covid-19, akan tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang dirilis oleh pemerintah berada di bawahnya.

- Responden cukup optimis pandemi Covid-19 akan berakhir kurang dari satu tahun. Hal ini mengindikasikan harapan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah baik pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota.



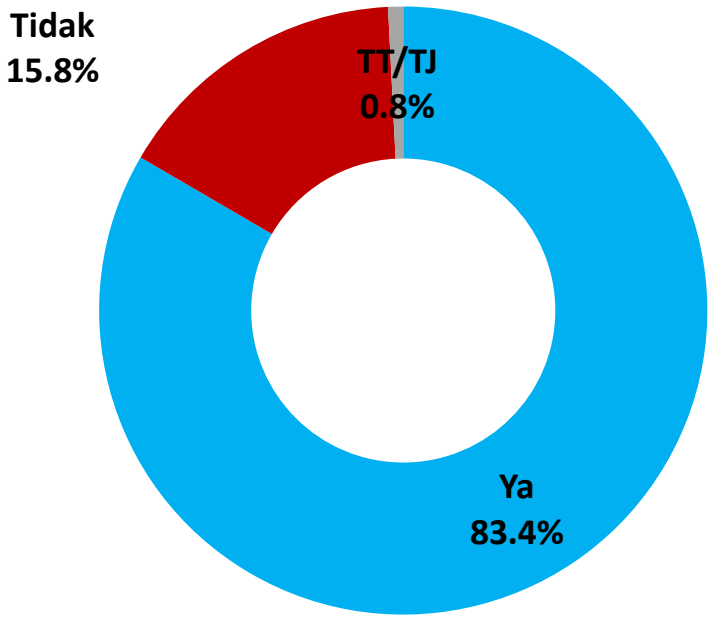
CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

Bantuan Sosial

Pengaruh Covid-19 terhadap penghasilan

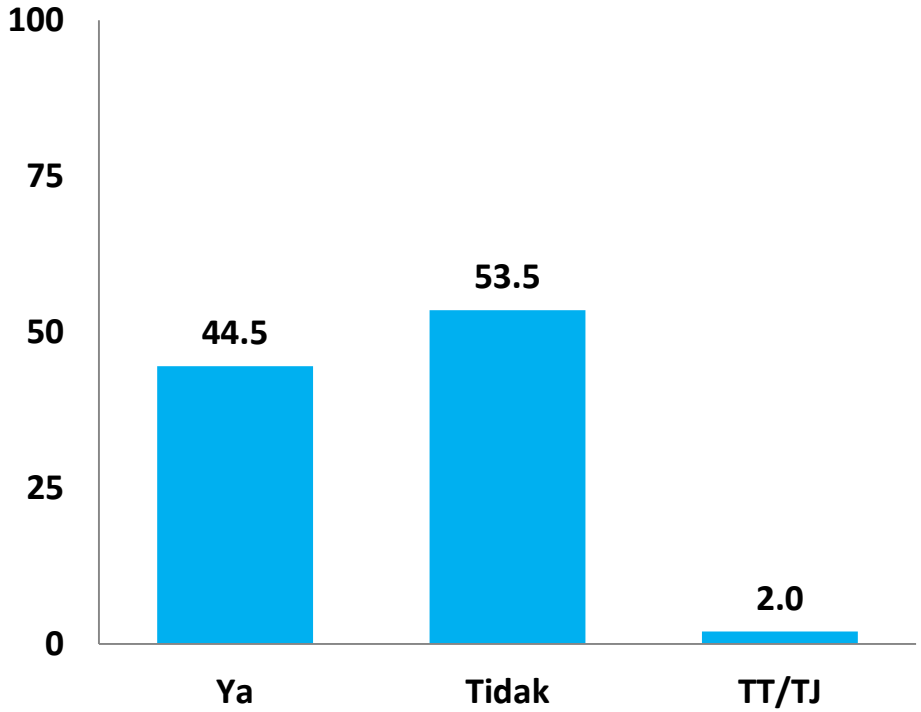
Apakah Covid-19 ini mengancam / mengurangi pemasukan atau penghasilan Bapak/Ibu/Saudara?



Mayoritas responden menilai bahwa pandemi Covid-19 mengancam pemasukan/penghasilan mereka.

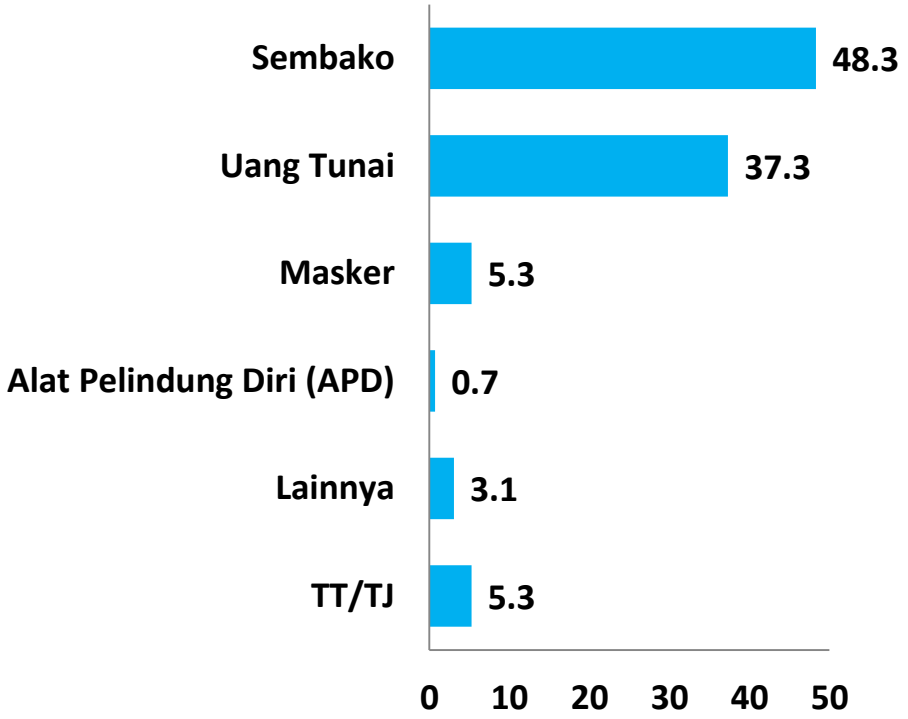
Bantuan selama masa pandemi Covid-19

Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menerima bantuan yang berkaitan dengan kasus Covid-19?



Bantuan apa yang Bapak/Ibu/Saudara terima? [Ditanyakan pada yang menjawab "Ya pernah menerima bantuan"]

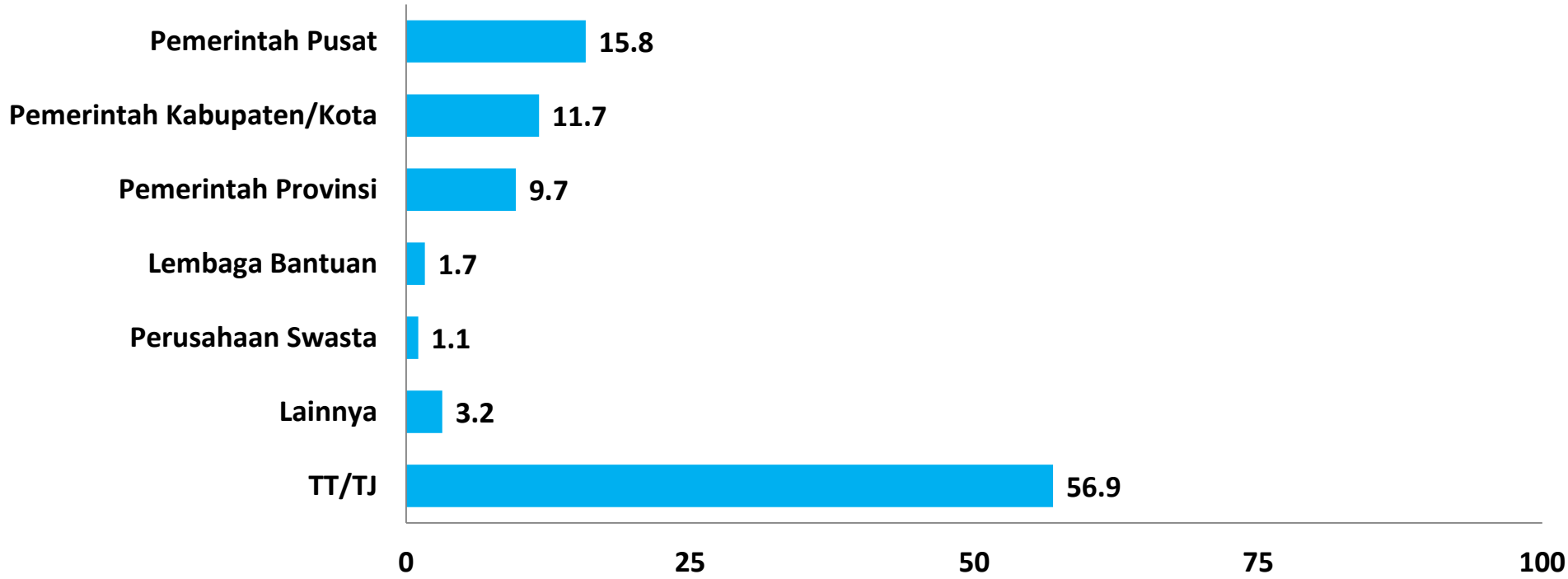
N = 890



Sebanyak 44.5% responden menyatakan pernah menerima bantuan yang berkaitan dengan Covid-19. Mayoritas bantuan yang diterima adalah berupa sembako (48.3%) dan uang tunai (37.3%).

Bantuan selama masa pandemi Covid-19 (Lanj.)

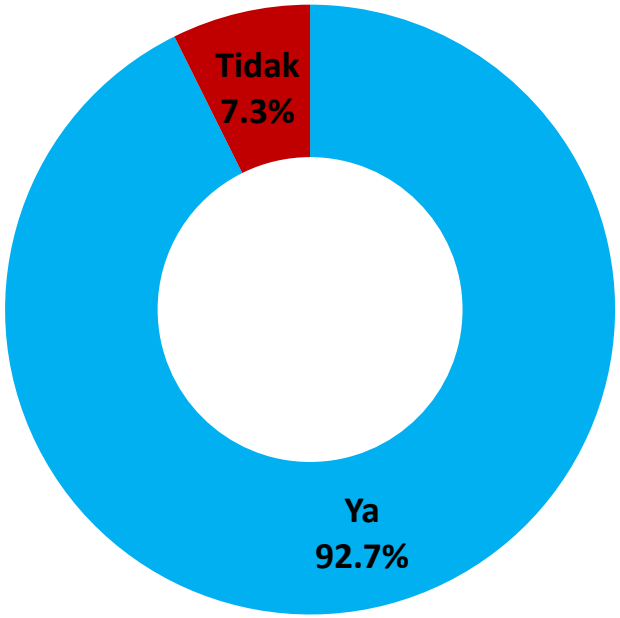
Dari pihak mana Bapak/Ibu/Saudara menerima bantuan?



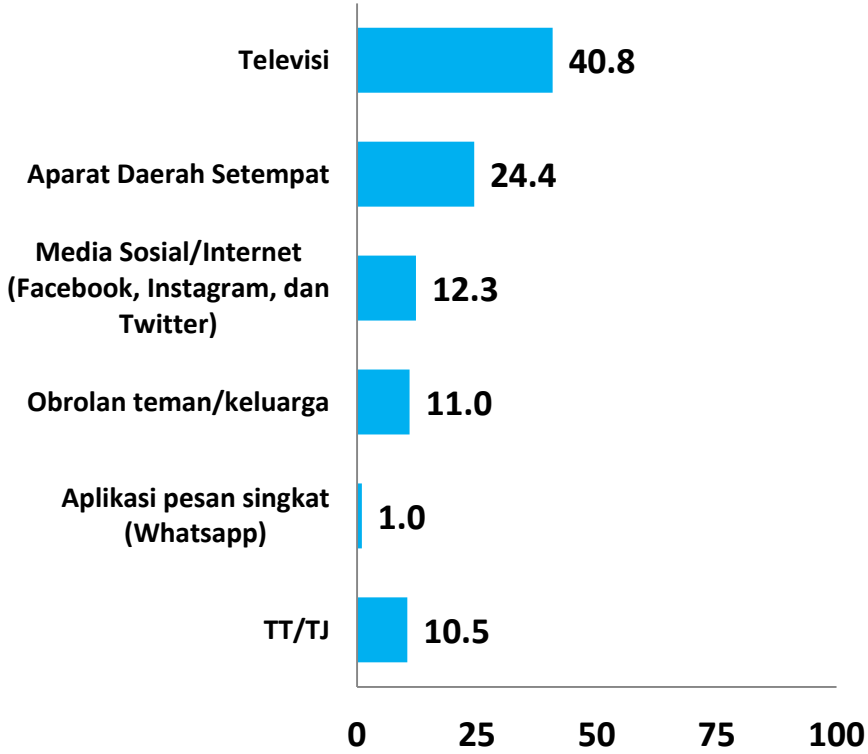
Secara umum, bantuan yang diterima oleh responden dipersepsikan berasal dari pemerintah pusat (15.8%), pemerintah Kabupaten/Kota (11.7%) dan Pemerintah Provinsi (9.7%).

Bantuan Sosial dan sumber informasi

Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya Bantuan Sosial yang diberikan Pemerintah selama Pandemi COVID-19 di daerah Bapak/Ibu/Saudara?



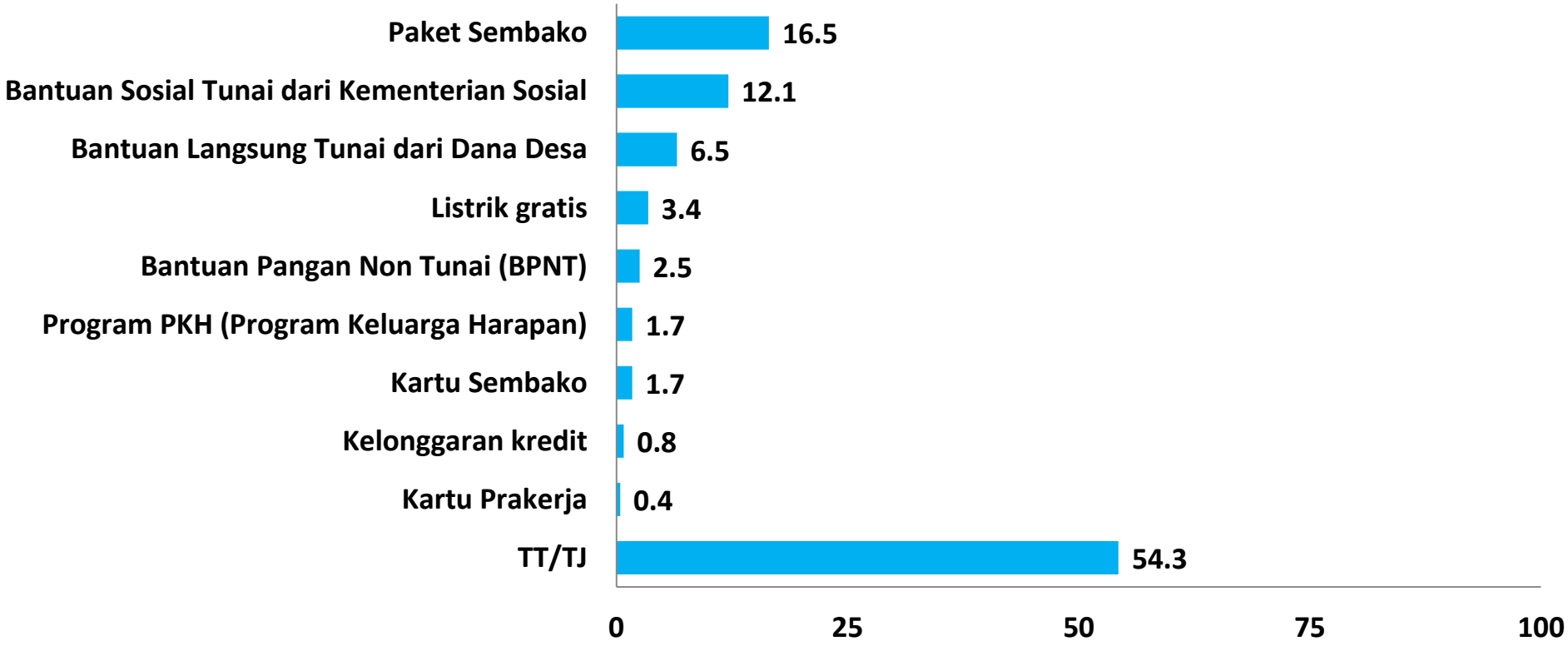
Dari mana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi mengenai Bantuan Sosial yang akan diberikan selama COVID-19?



Mayoritas responden (92.7%) menyatakan mengetahui adanya Bantuan Sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19. Pada umumnya responden mengetahui informasi mengenai Bantuan Sosial dari televisi (40.8%) dan aparat daerah setempat (24.4%).

Jenis Bantuan Sosial yang diterima

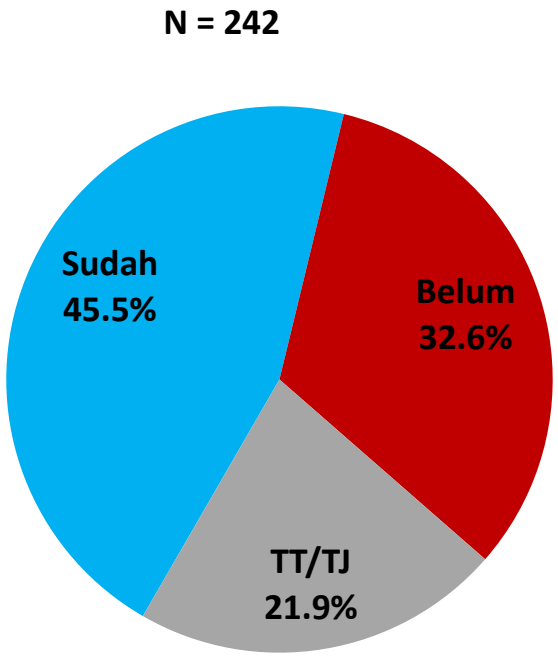
Jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu/Saudara dan keluarga dalam 1 (satu) KK terima dari Pemerintah Pusat?



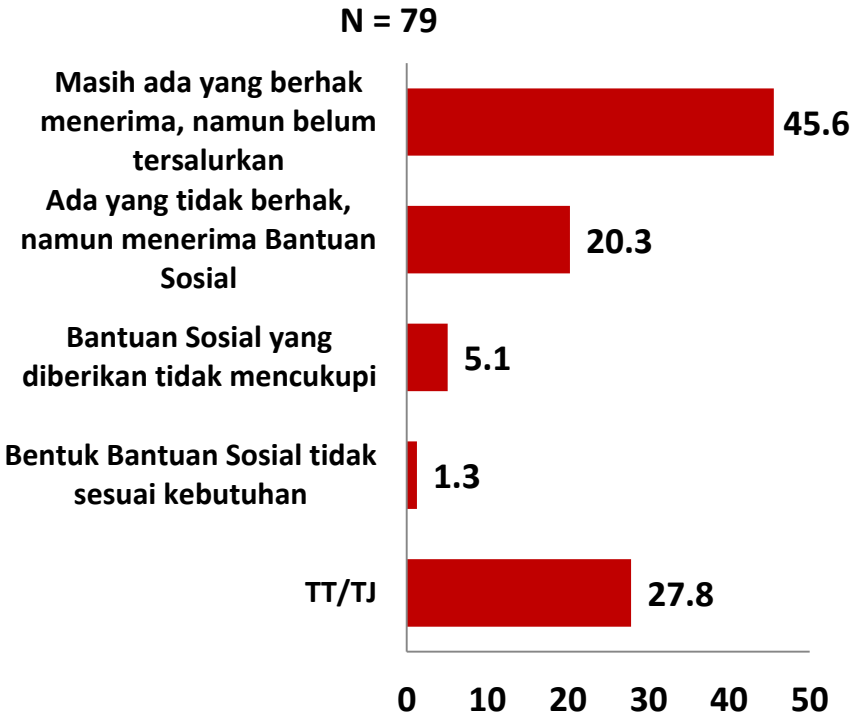
Secara umum responden menyatakan bantuan yang diterima adalah berupa paket sembako. Terkait dengan Sembako, responden terlihat tidak bisa membedakan bantuan yang diterimanya apakah paket Sembako, BPNT, ataupun Kartu Sembako.

Penilaian terhadap Bantuan Sosial Tunai

Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran? [Ditanyakan pada yang menjawab "Menerima Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial"]



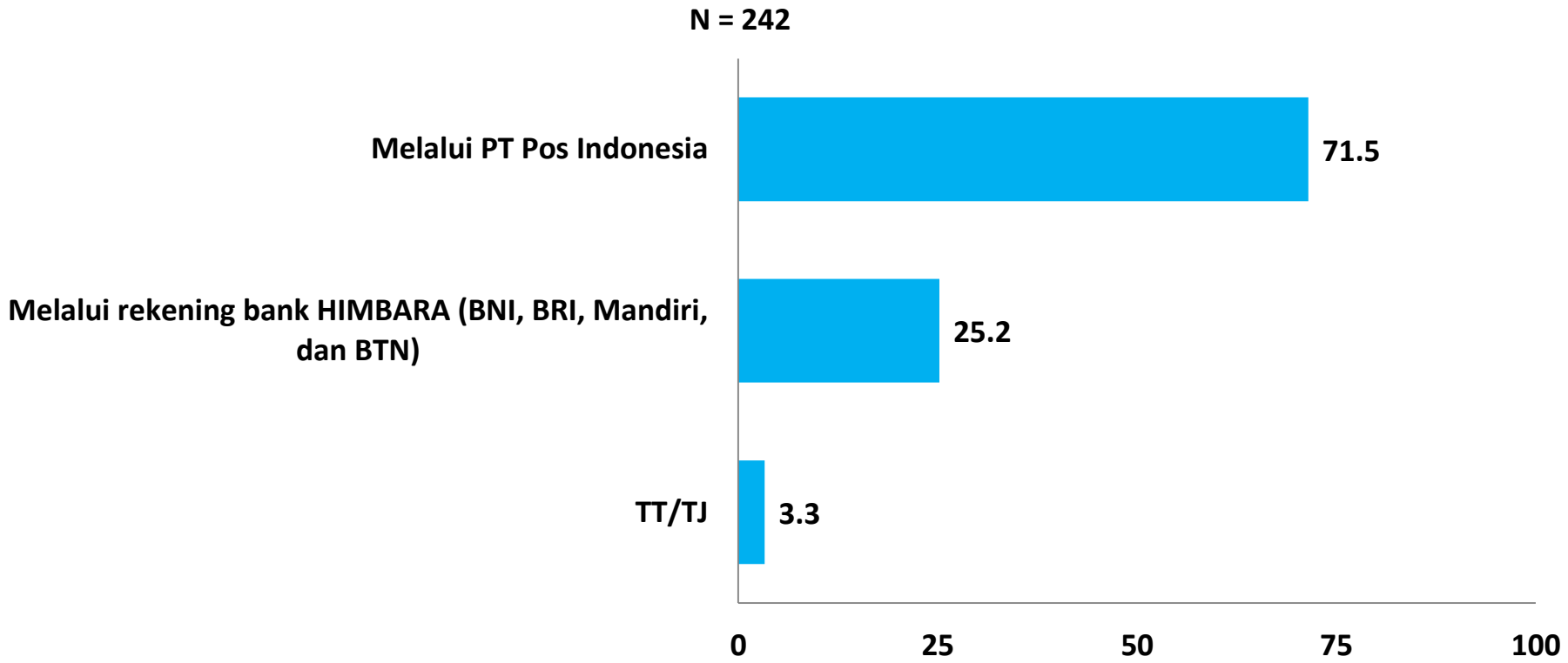
Mengapa Bapak/Ibu/Saudara menganggap Bantuan Sosial Tunai (BST)tersebut belum tepat sasaran? [Ditanyakan pada yang menjawab "Belum"]



Mayoritas responden yang menerima BST dari Kementerian Sosial, menyatakan pemberian BST sudah tepat sasaran (45.5%). Sementara terdapat 32.6% responden yang menyatakan pemberian BST belum tepat sasaran. Alasan utama pemberian BST belum tepat sasaran dikarenakan masih ada masyarakat yang berhak menerima, namun belum tersalurkan (45.6%).

Pilihan Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial Tunai

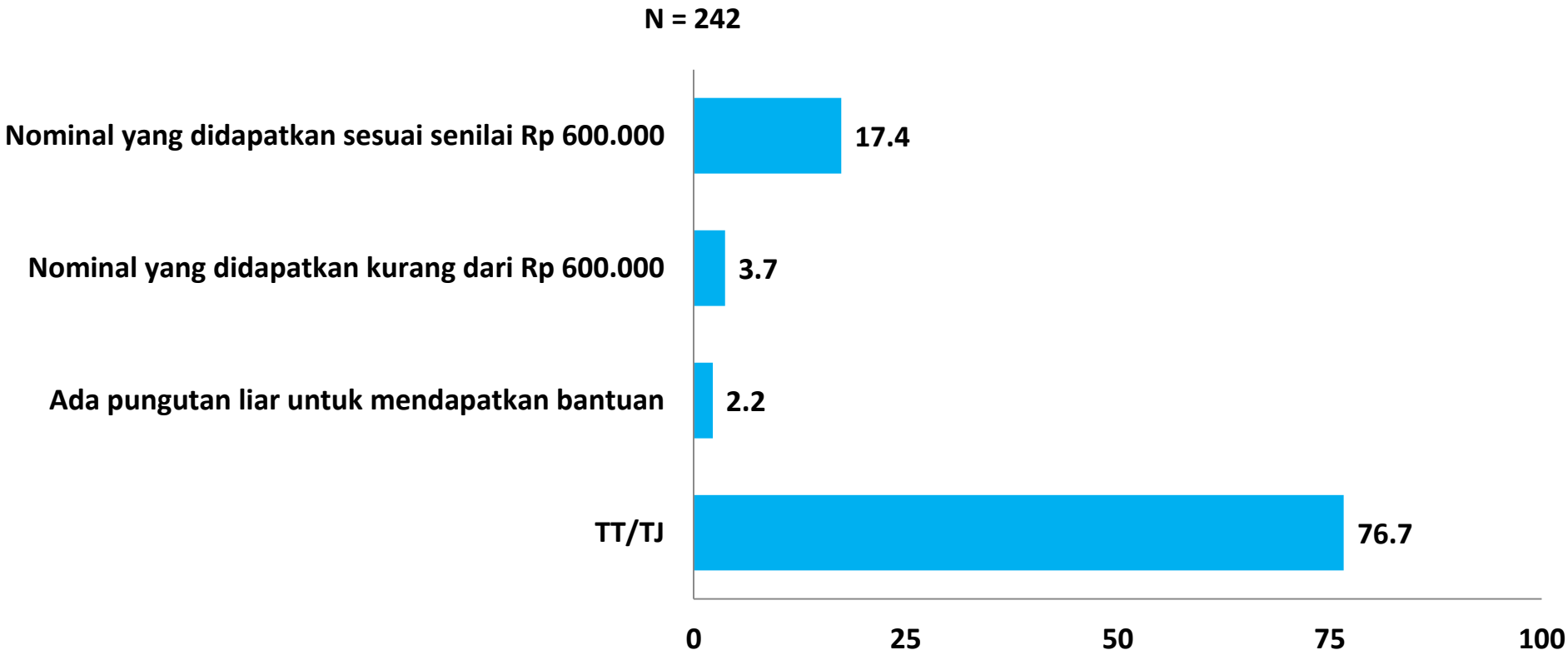
Metode pencairan apa yang Bapak/Ibu/Saudara pilih untuk mendapatkan BST? [Ditanyakan pada yang menjawab "Menerima Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial"]



PT. Pos Indonesia (71.5%) menjadi pilihan utama responden di dalam memperoleh Bantuan Sosial Tunai daripada melalui rekening bank HIMBARA (25.2%).

Nominal Bantuan Sosial Tunai

Kondisi mana di bawah ini yang sesuai ketika Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan BST?

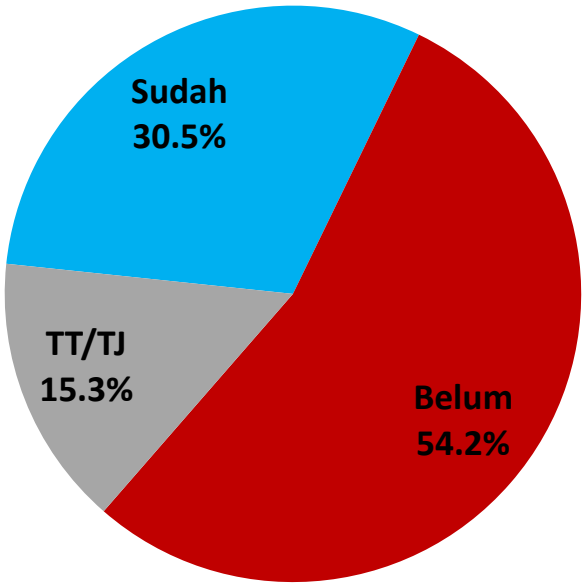


Masyarakat yang menyatakan nominal BST yang diterimanya sesuai senilai Rp 600.000,- adalah sebanyak 17.4%.

Penilaian terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

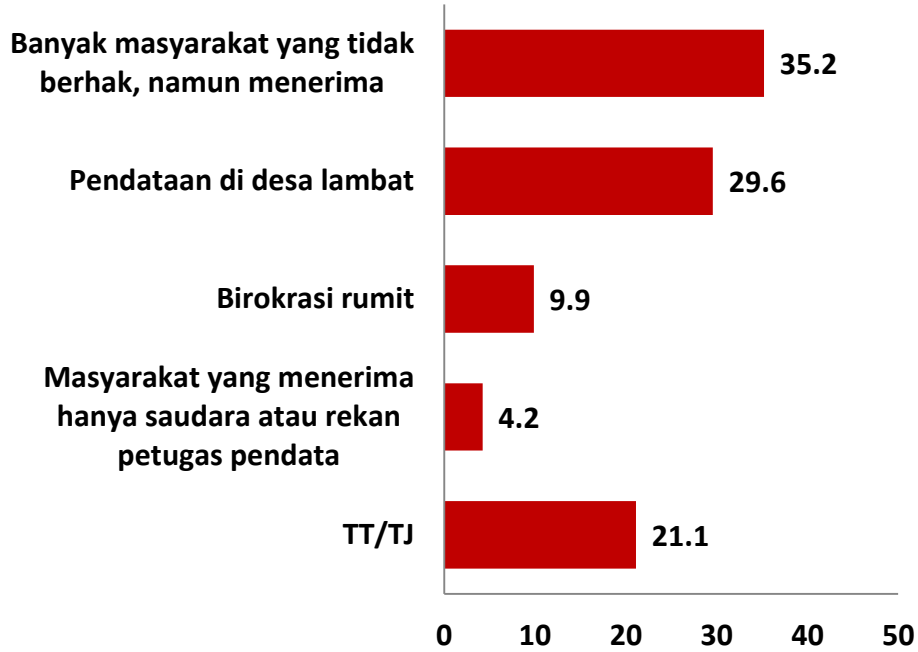
Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran? [Ditanyakan pada yang menjawab "Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa"]

N = 131



Mengapa Bapak/Ibu/Saudara menganggap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut belum tepat sasaran? [Ditanyakan pada yang menjawab "Belum"]

N = 71



Mayoritas responden yang menerima BLT Dana Desa menilai pemberian belum tepat sasaran (54.2%). Alasan utama penilaian masyarakat tersebut adalah karena banyak masyarakat yang tidak berhak, namun menerima (35.2%) dan pendataan di desa yang lambat (29.6%).

Temuan 3

- Pandemi Covid-19 dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi penghasilan / pemasukan masyarakat.

- Bantuan selama masa pandemi cukup dirasakan oleh sebagian responden. Bantuan yang diterima terutama berbentuk sembako dan uang tunai.

- Terkait dengan Bantuan Sosial, sosialisasi yang dilakukan sudah cukup masif dan intensif. Dalam penyebarannya, penyebaran Bantuan Sosial Tunai (BST) dinilai lebih baik oleh responden yang menerimanya dibandingkan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).



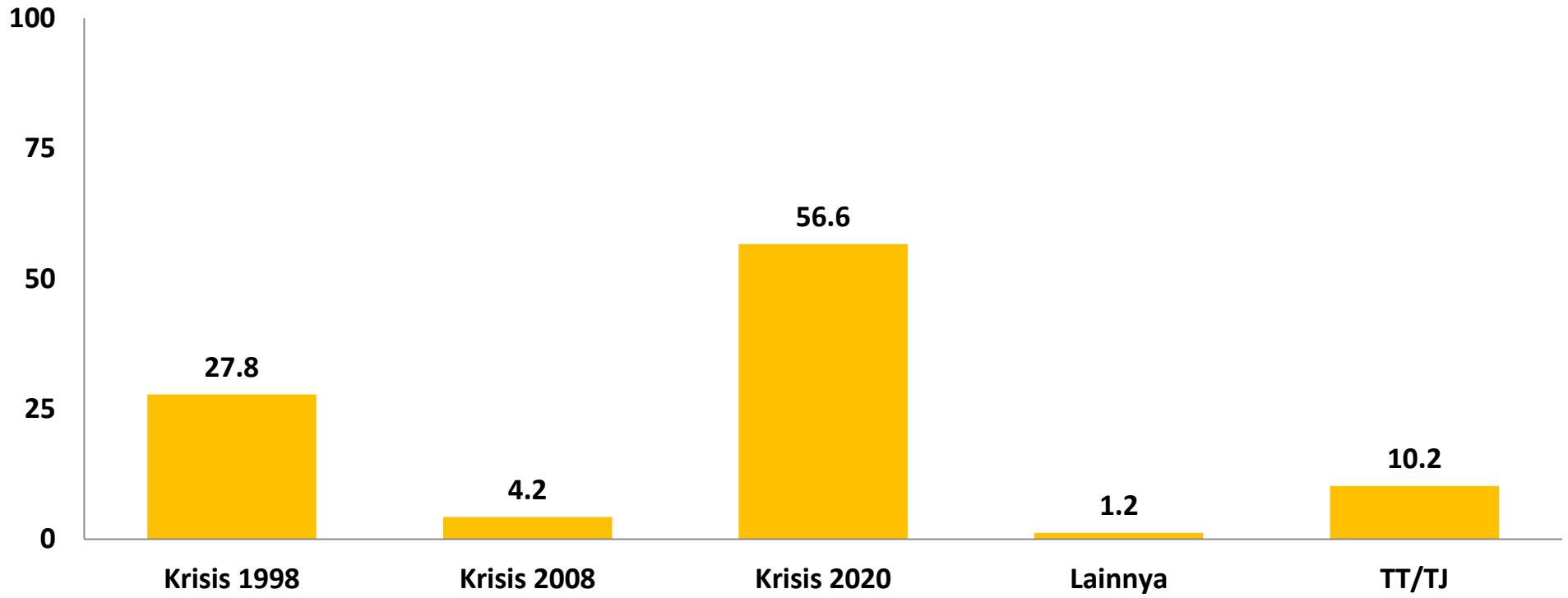
CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

Kondisi Sosial Ekonomi

Perbandingan Masa Krisis

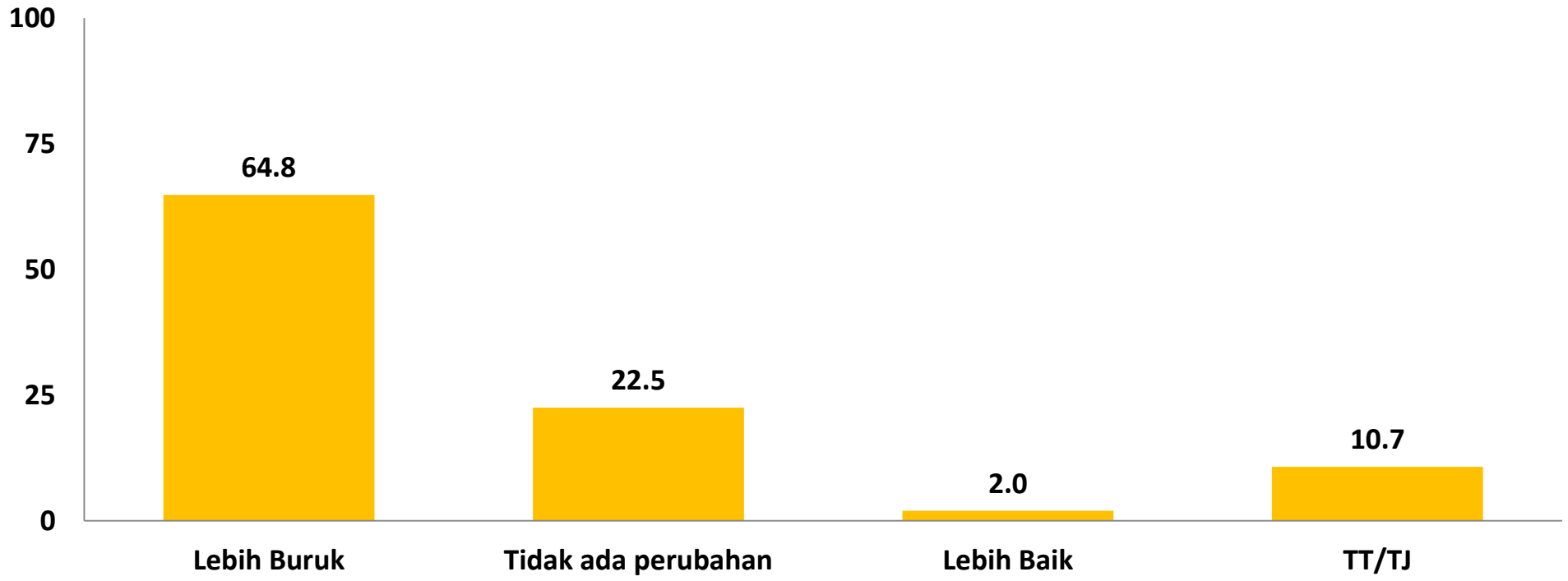
Jika dibandingkan krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut pendapat Bapak/Ibu pada masa krisis manakah yang paling buruk pernah dirasakan?



Krisis 2020 dinilai masyarakat sebagai krisis paling buruk yang pernah dirasakan.

Keadaan ekonomi rumah tangga

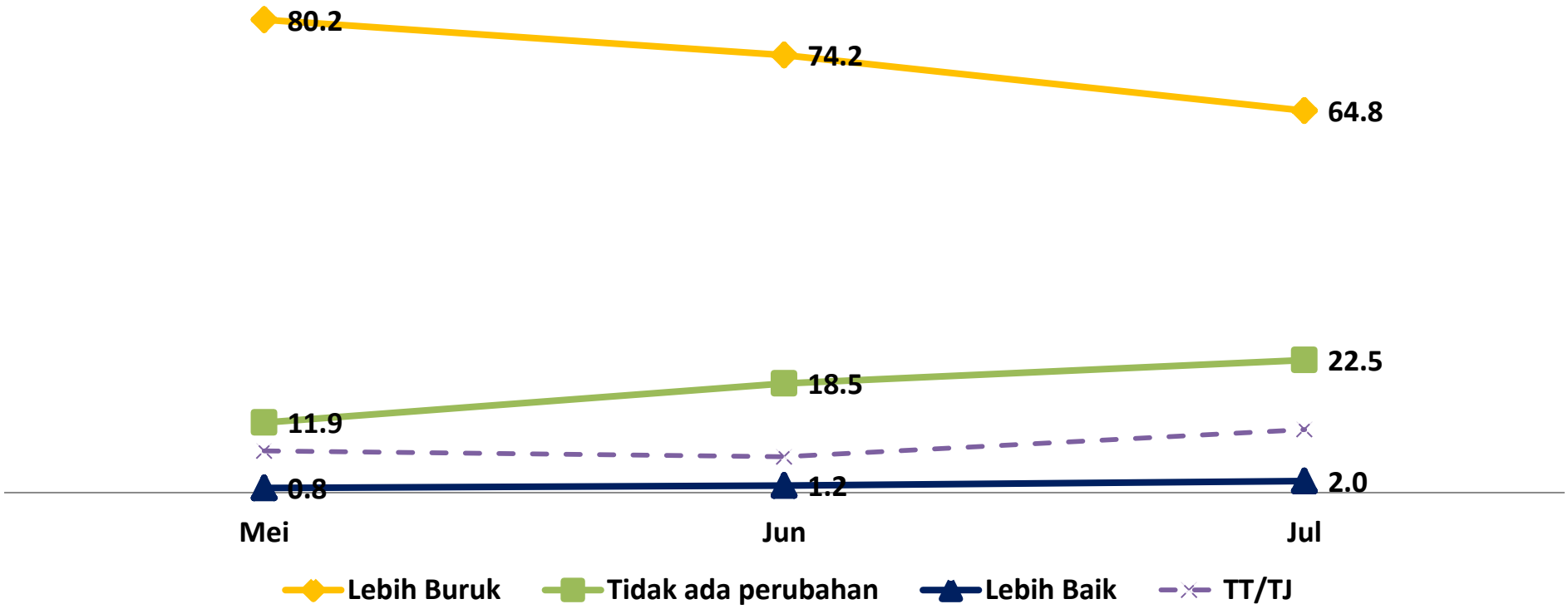
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat keadaan ekonomi rumah tangga Bapak/Ibu/Saudara pada umumnya sekarang ini dibanding sebelum adanya wabah Covid-19? Apakah Lebih Buruk, Tidak ada perubahan, Lebih Baik?



Mayoritas responden menilai bahwa keadaan ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk (64.8%) dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19.

Trend:

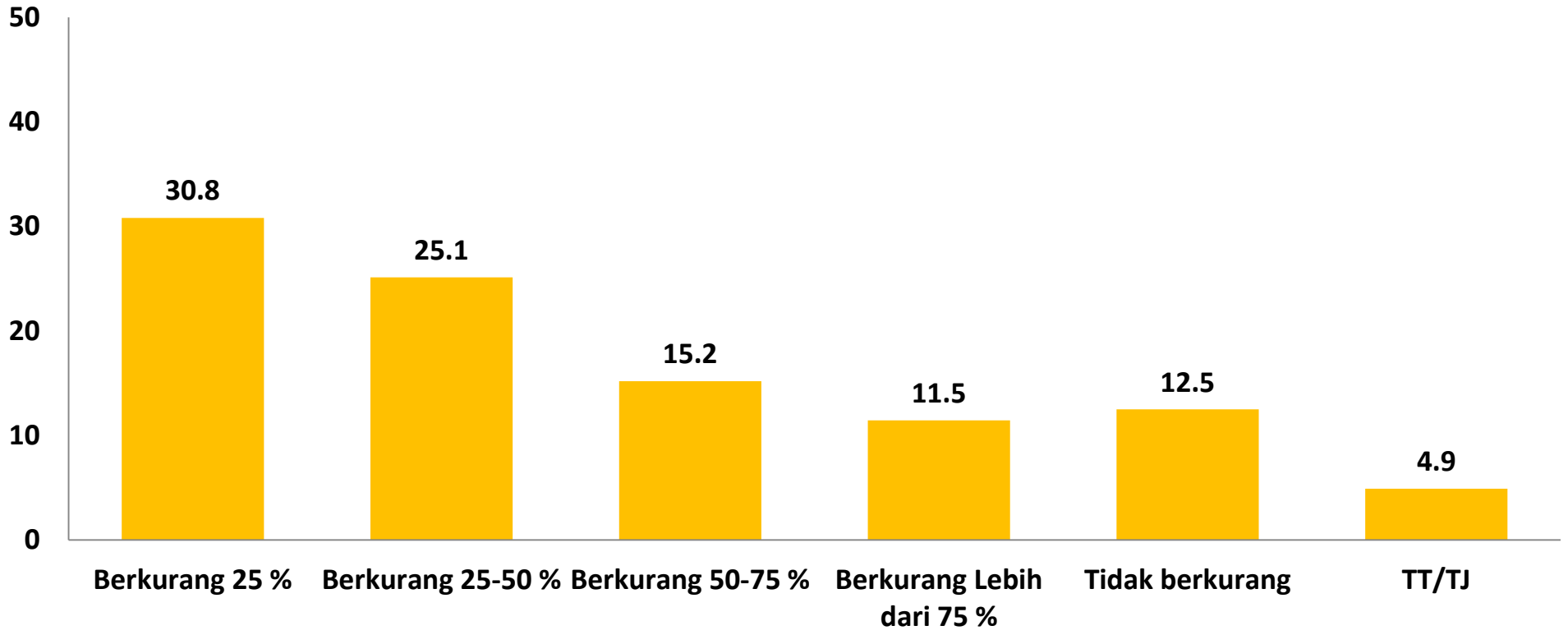
Keadaan ekonomi rumah tangga



Persepsi responden mengenai keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang lebih buruk dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19 cenderung menurun. Persepsi terburuk terjadi pada bulan Mei.

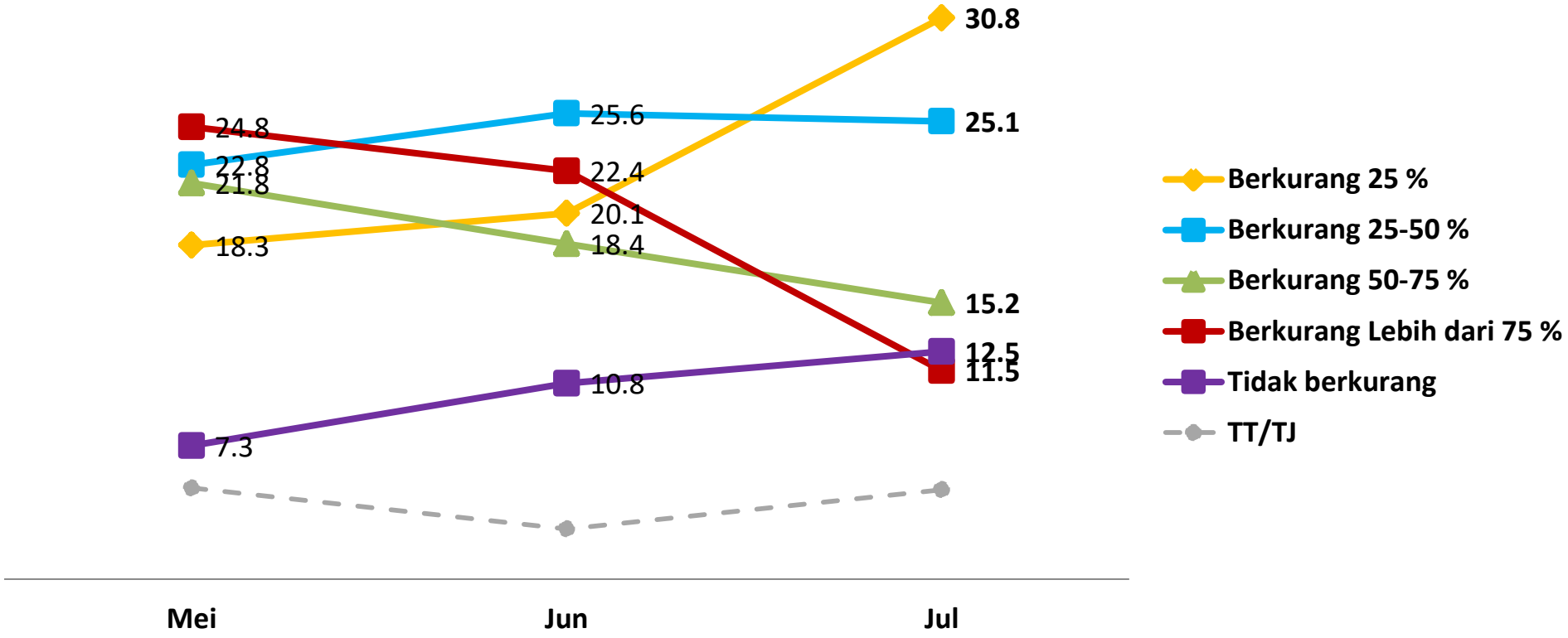
Dampak *new normal* terhadap penghasilan

Bagaimana penghasilan Anda sejak dikeluarkannya imbauan new normal?



Mayoritas responden menyatakan bahwa penghasilan mereka berkurang 25% sejak dikeluarkannya imbauan *new normal* (30.8%).

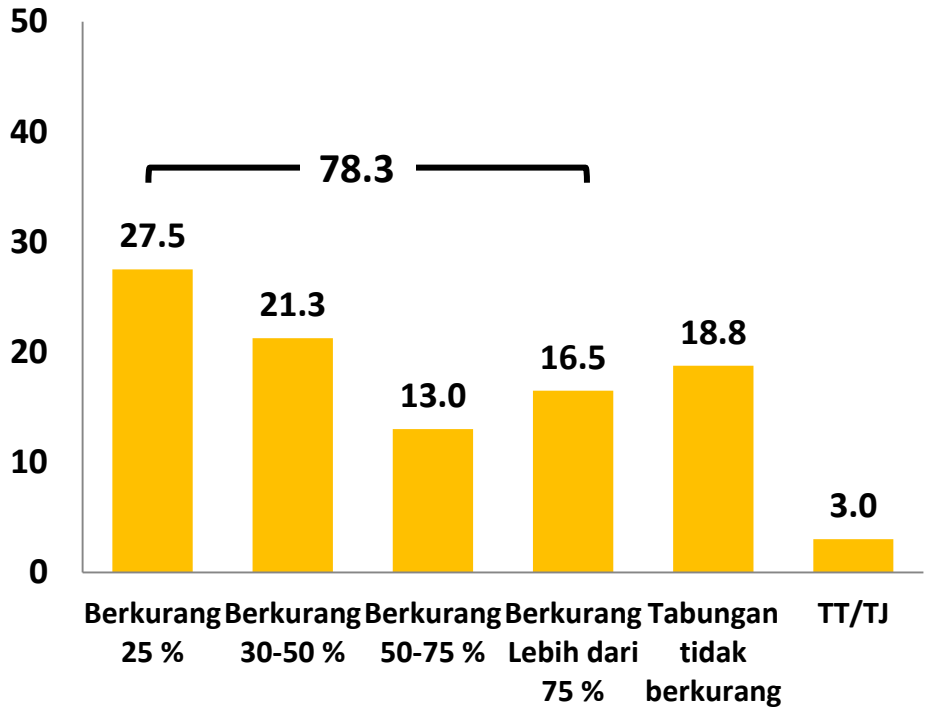
Trend:
Dampak *new normal* terhadap penghasilan



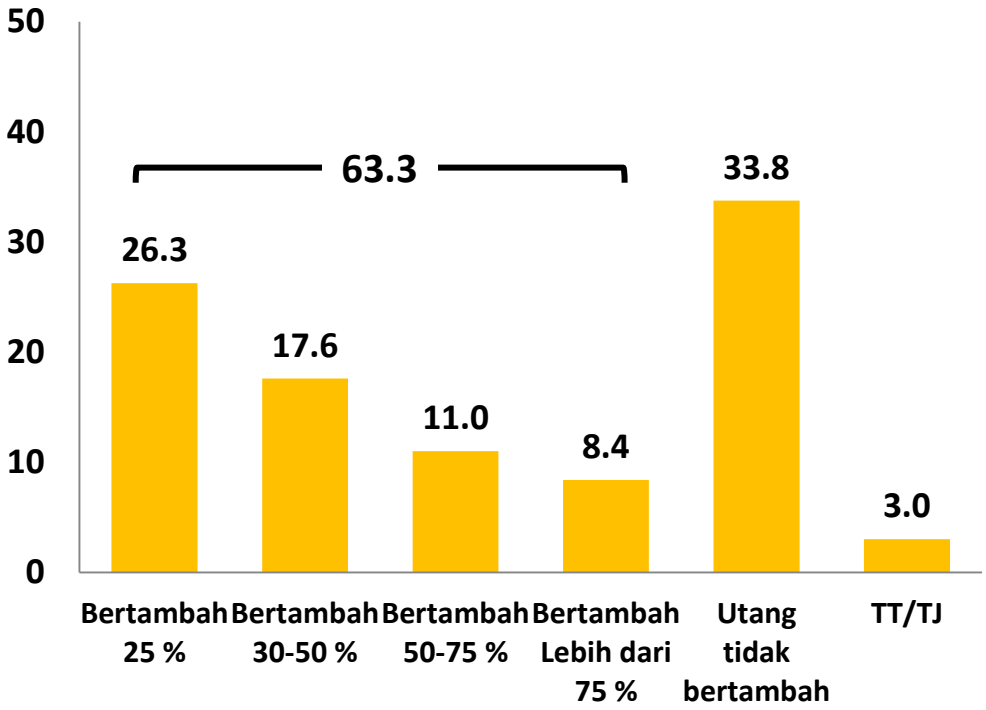
Dilihat dari sisi trend, persentase responden yang menyatakan penghasilannya berkurang 50-75% dan berkurang 75% berada paling tinggi pada bulan Mei dan cenderung semakin berkurang. Sementara yang menyatakan penghasilannya berkurang 25% dan tidak berkurang, cenderung meningkat.

Gambaran kondisi setelah diberlakukan *new normal*: Tabungan dan Utang

Kondisi mana yang menggambarkan tabungan Anda setelah diberlakukan new normal?



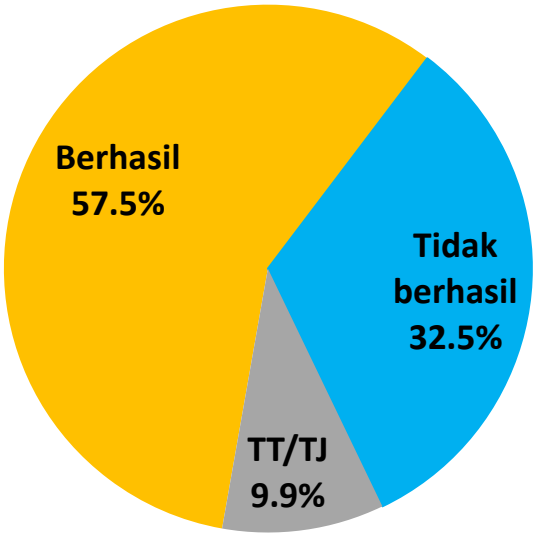
Kondisi mana yang menggambarkan jumlah utang Anda setelah diberlakukan new normal?



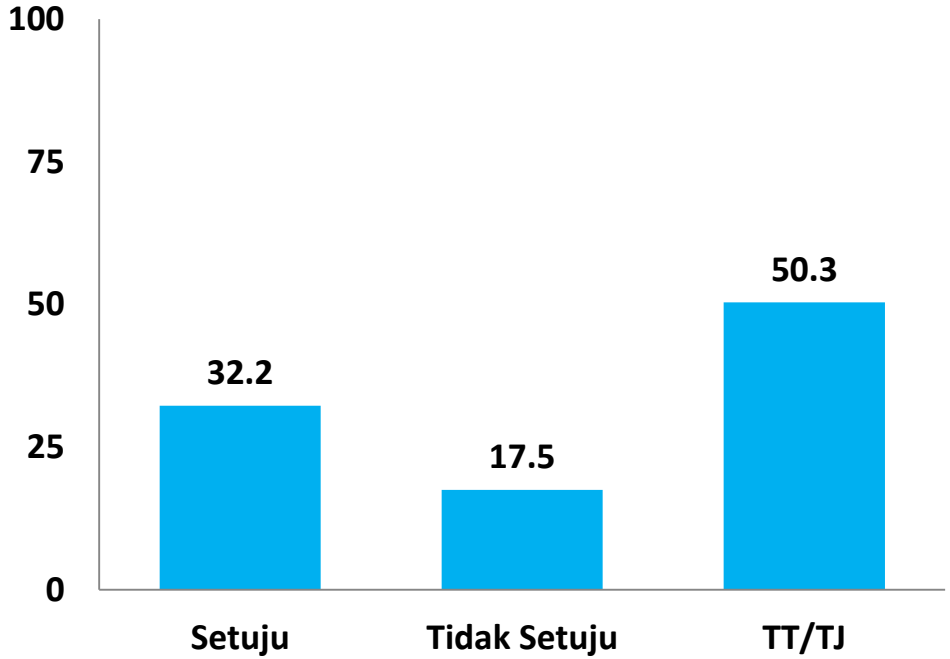
Mayoritas responden menyatakan bahwa setelah diberlakukan *new normal* tabungan mereka berkurang (78.3%) dan utang mereka bertambah (63.3%).

Pemulihan Ekonomi dan Gugatan Sosial

Menurut Anda, apakah Joko Widodo sudah berhasil mendorong pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan pemulihan ekonomi (bantuan sosial, bantuan paket sembako, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, kebijakan listrik gratis, kelonggaran kredit) pasca pandemi covid-19?



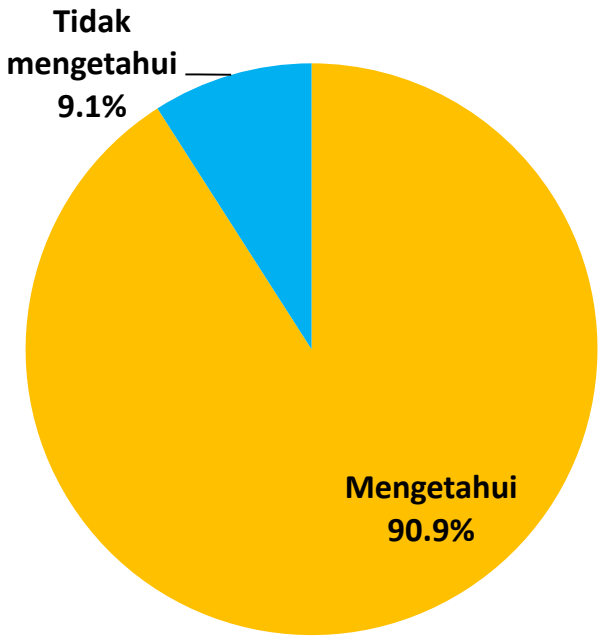
Apakah Anda setuju atau tidak setuju apabila dilakukan gugatan atau protes sosial terhadap Joko Widodo terkait kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid-19? [Ditanyakan pada yang menjawab "Tidak berhasil"]



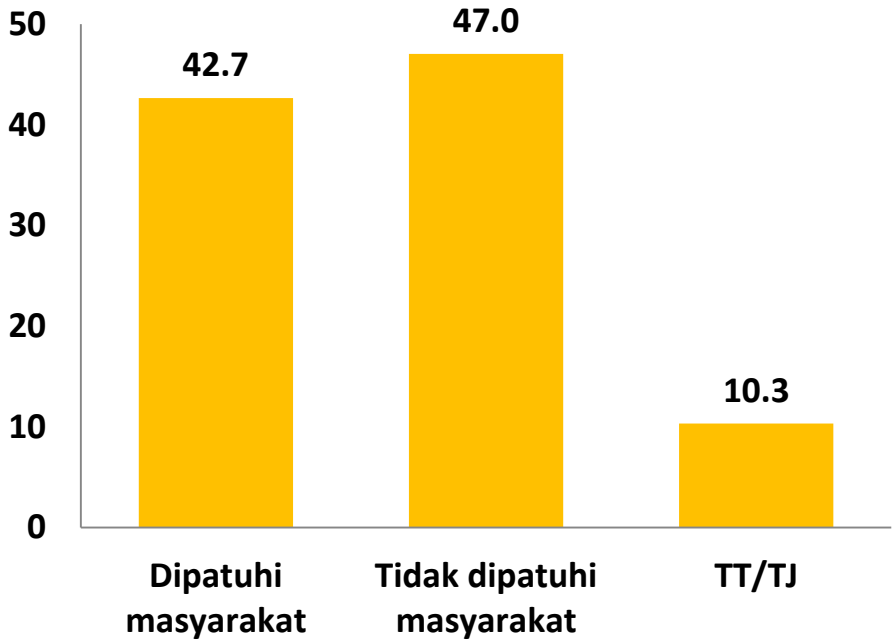
Sebanyak 32.5% responden menyatakan Joko Widodo tidak berhasil mendorong pemulihan ekonomi Indonesia melalui kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sementara sebanyak 32.2% dari yang menyatakan "Tidak Berhasil" setuju untuk dilakukan gugatan/protes sosial terhadap Joko Widodo terkait kebijakan pemulihan ekonomi tersebut.

Perilaku New Normal

Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau tidak mengetahui saat ini diberlakukan Normal Baru dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhi protokol kesehatan?



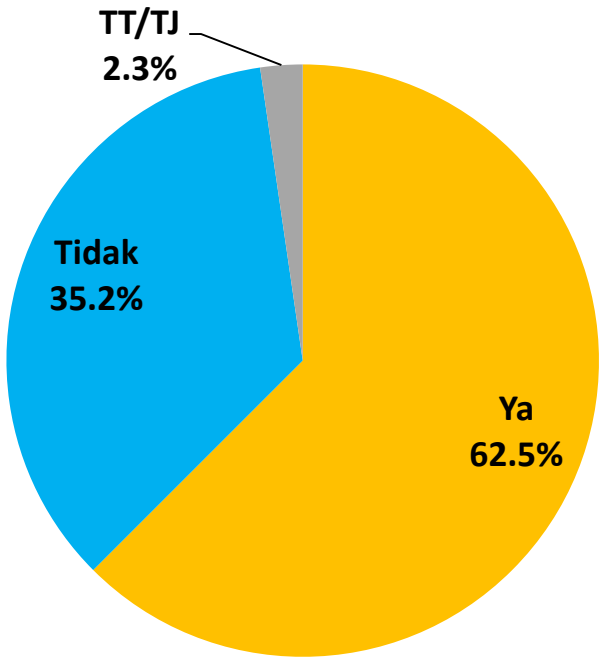
Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah penerapan Normal Baru dalam kehidupan sehari-hari untuk terhindar dari Covid-19 (Virus Corona) sudah dipatuhi atau tidak dipatuhi masyarakat?



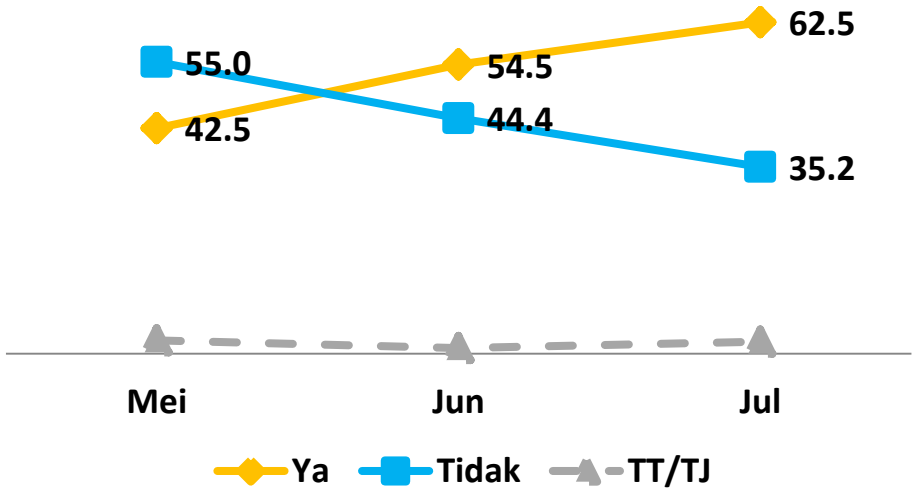
Mayoritas responden menyatakan mengetahui saat ini diberlakukan Normal Baru (90.9%). Lebih banyak responden yang menilai penerapan Normal Baru tidak dipatuhi masyarakat (47.0%) dibandingkan dengan yang menyatakan dipatuhi masyarakat (42.7%).

Aktivitas di luar rumah selama masa pandemi

Selama 1 minggu terakhir, apakah Anda beraktivitas di luar rumah?



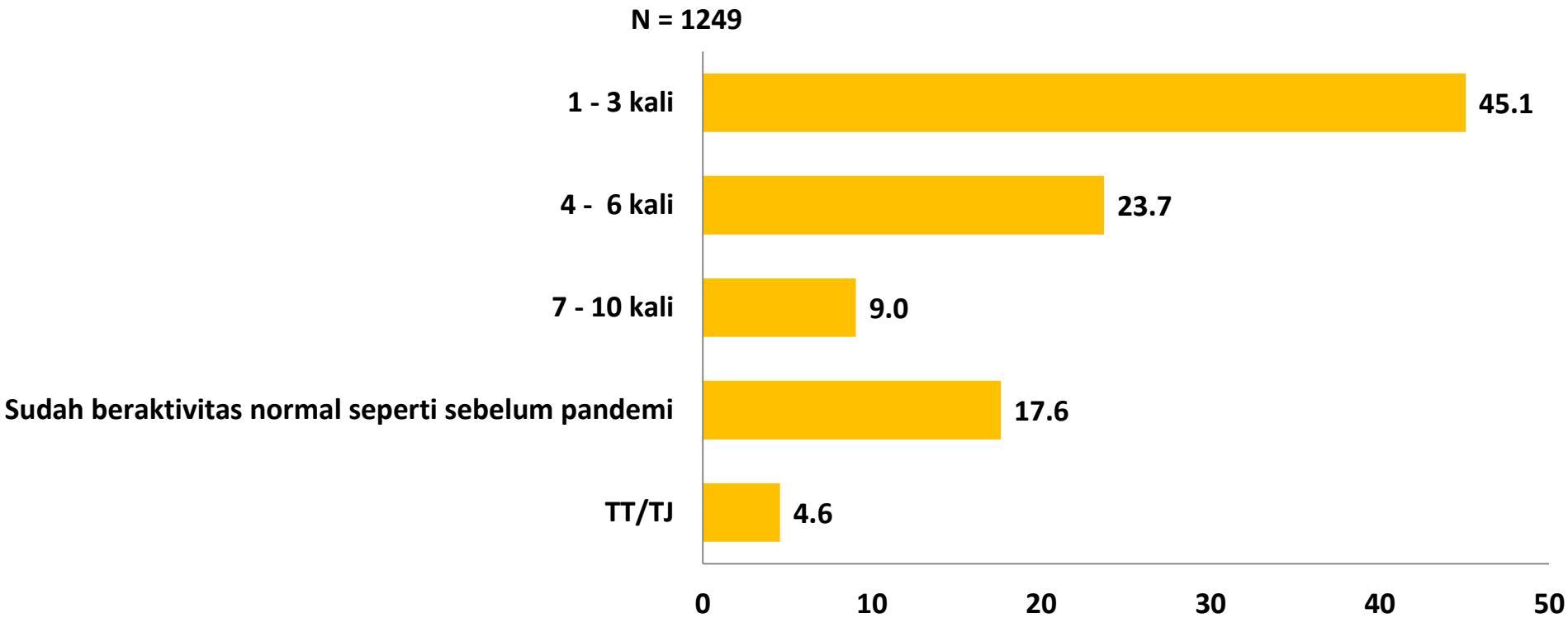
Trend: **Aktivitas di luar rumah selama masa pandemi**



Mayoritas responden menyatakan bahwa dalam 1 minggu terakhir mereka beraktivitas di luar rumah (62.5%). Dilihat dari trend, hal ini cenderung meningkat tajam setiap bulannya.

Aktivitas di luar rumah selama masa pandemi (Lanj.)

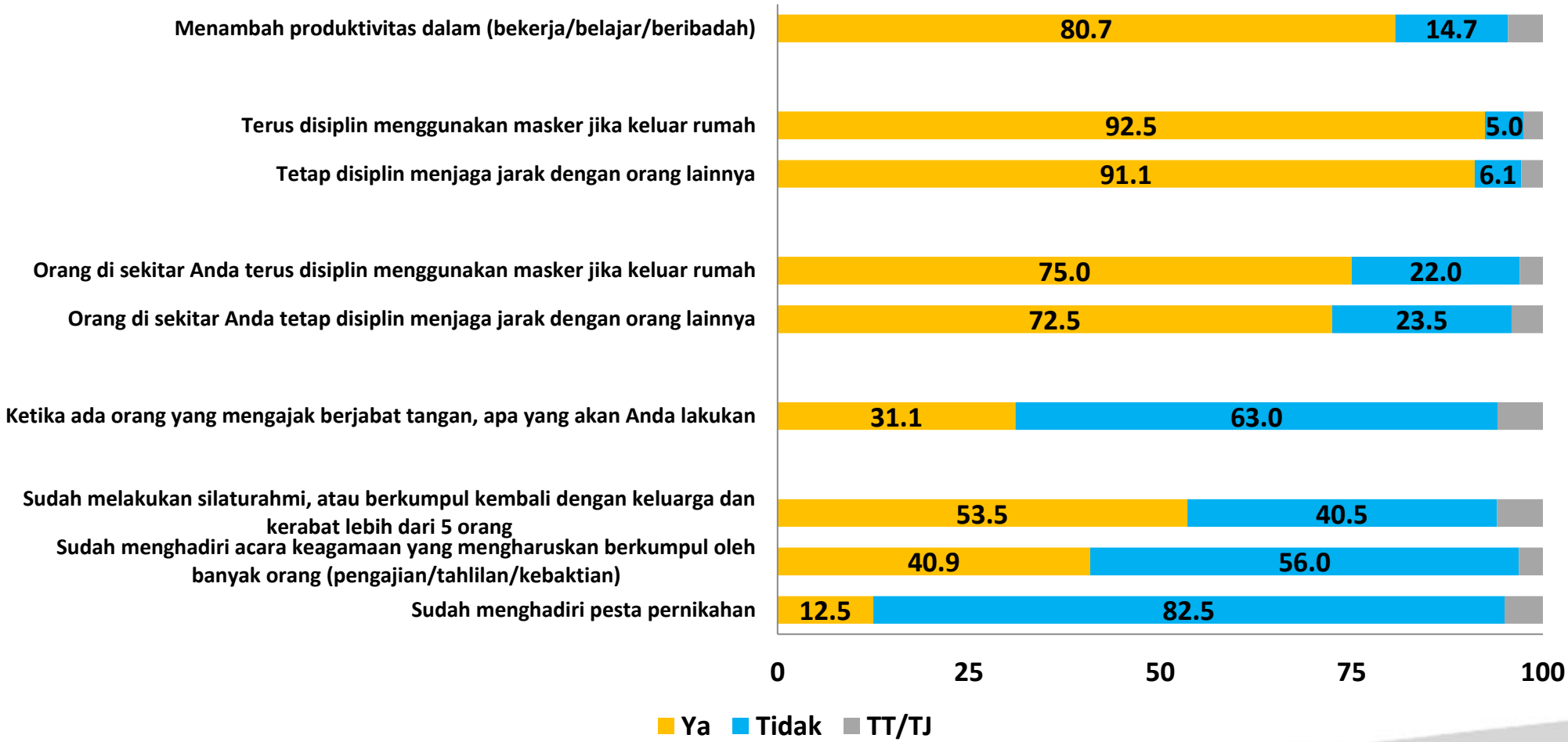
Dalam 1 minggu terakhir, sudah berapa kali Anda keluar [Ditanyakan pada yang menjawab "Ya"]



Intensitas responden untuk beraktivitas ke luar rumah paling tinggi adalah 1-3 kali (45.1%). Akan tetapi terdapat 17.6% yang menyatakan aktivitas mereka sudah normal seperti sebelum pandemi.

Persepsi mengenai *new normal*

Apakah pada saat new normal Bapak/Ibu/Saudara .....?



Temuan 4

- Krisis pandemi Covid-19 tahun 2020 ini dinilai responden sebagai krisis paling parah yang pernah dialami.

- Meskipun demikian, persepsi responden mengenai kondisi sosial ekonomi terlihat lebih baik pada periode survei Juli ini dibandingkan dengan periode Mei dan Juni. Hal ini terlihat dari menurunnya anggapan keadaan ekonomi responden yang buruk, anggapan mengenai besaran penghasilan yang berkurang akibat pandemi ini, dan lain-lain tapi responden mulai terlihat adanya optimisme, walaupun keadaan tersebut masih jauh dari normal.

- Sangat disayangkan, optimisme responden terkait dengan kondisi sosial ekonomi ini juga berbarengan dengan meningkatnya ketidakdisiplinan responden untuk mematuhi protokol kesehatan selama periode new normal.



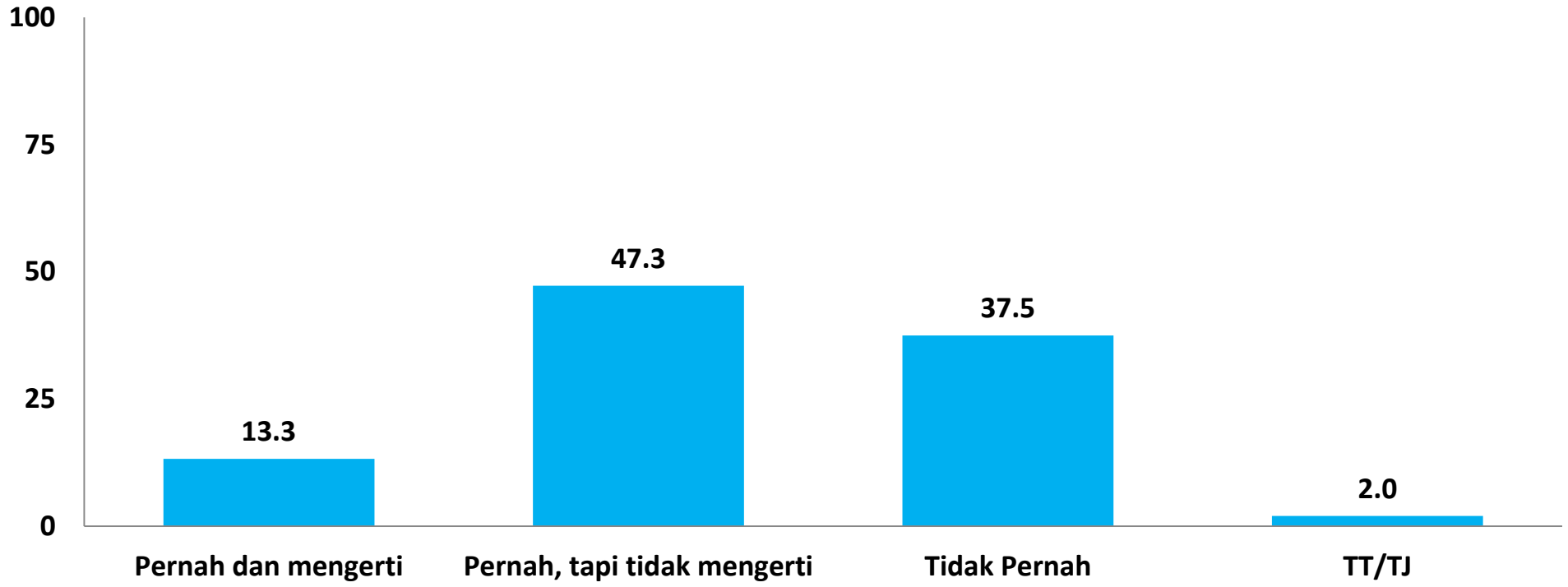
CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*)

Pengetahuan mengenai RUU Cipta Kerja

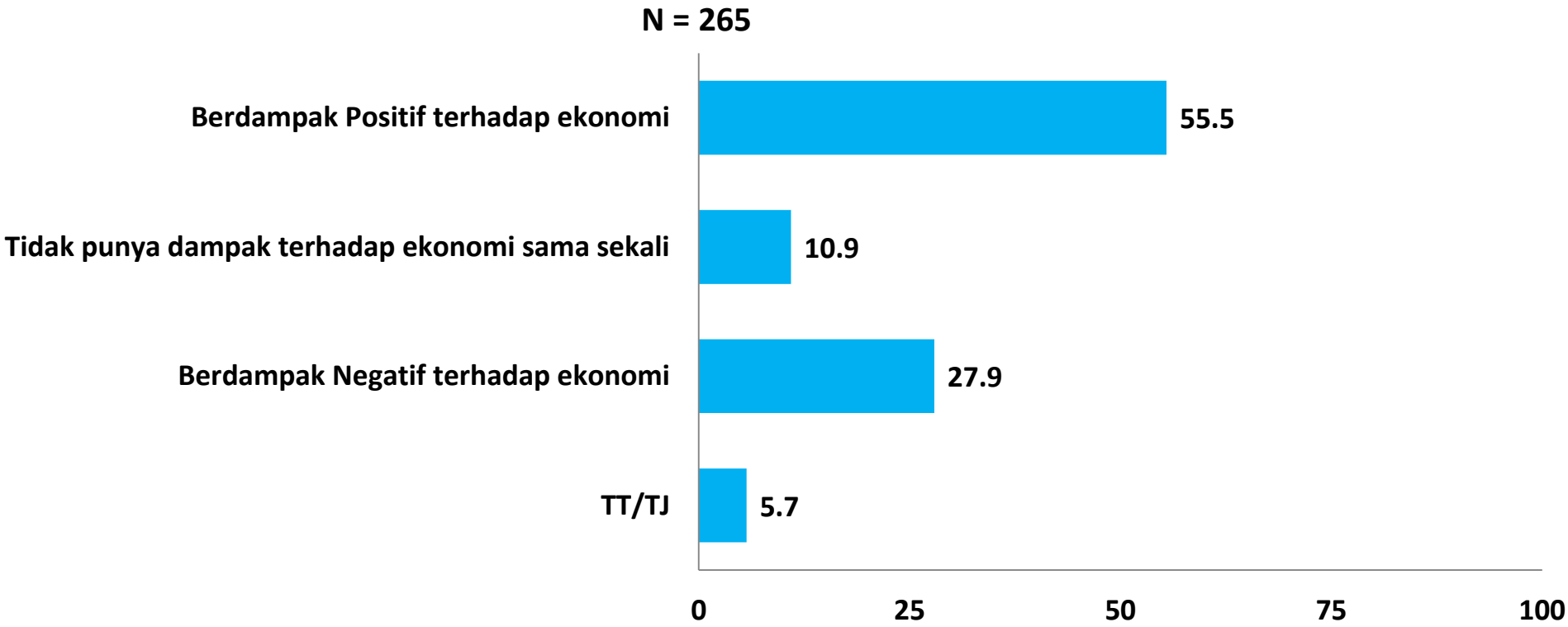
Apakah Anda tahu atau pernah mendengar berita mengenai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law?



Mayoritas responden menyatakan pernah mendengar berita mengenai RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), tapi tidak mengerti (47.3%) dan tidak pernah (37.5%). Sementara yang menyatakan pernah mendengar dan mengerti hanya 13.3%.

RUU Cipta Kerja:
Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19

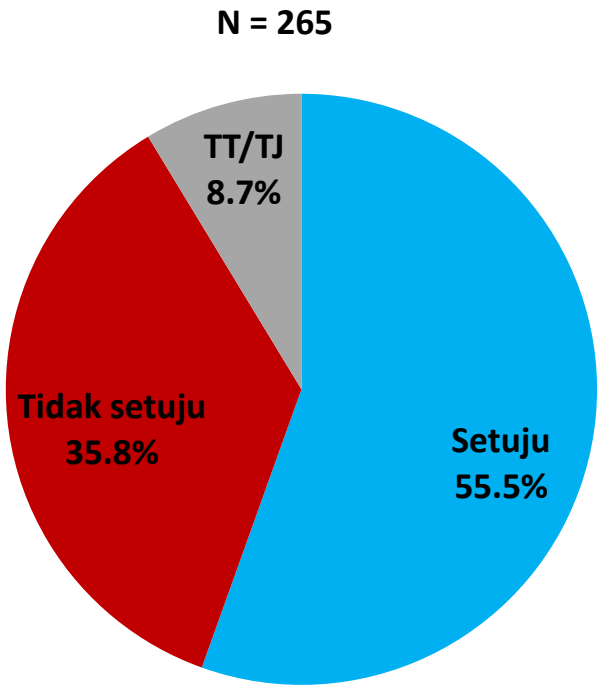
Menurut Anda, apakah pengaruh RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19?
[Ditanyakan pada yang menjawab "Mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja"]



Bagi yang mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, secara umum menilai bahwa RUU Cipta Kerja berdampak positif terhadap ekonomi (55.5%).

RUU Cipta Kerja:
Setuju/tidak pengesahan RUU Cipta Kerja

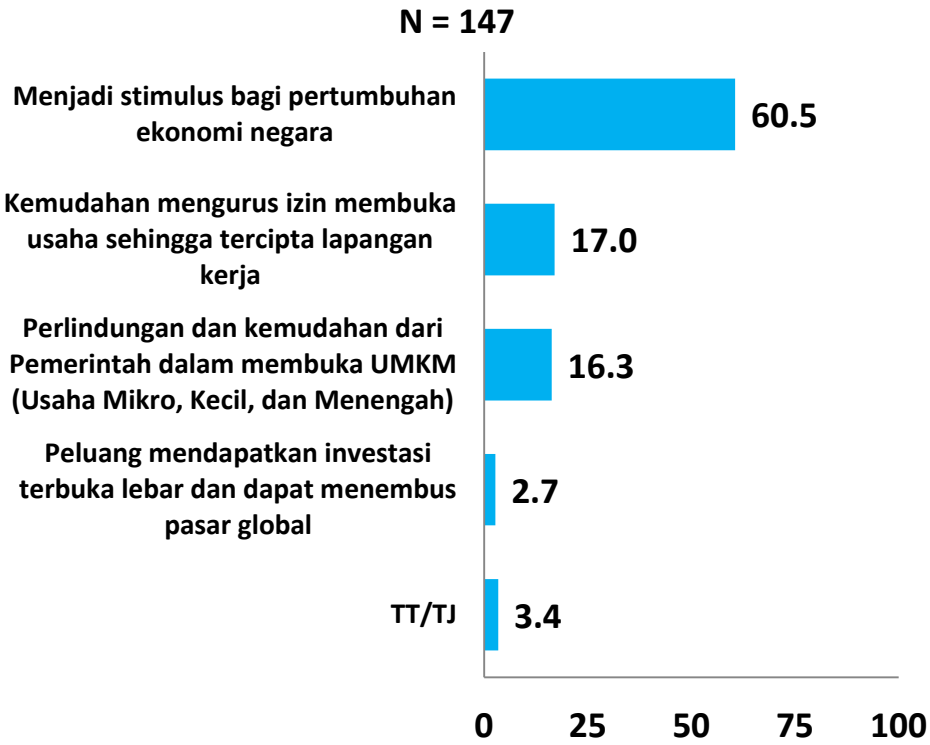
Apabila RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan hari ini, apakah Anda setuju? [Ditanyakan pada yang menjawab "Mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja"]



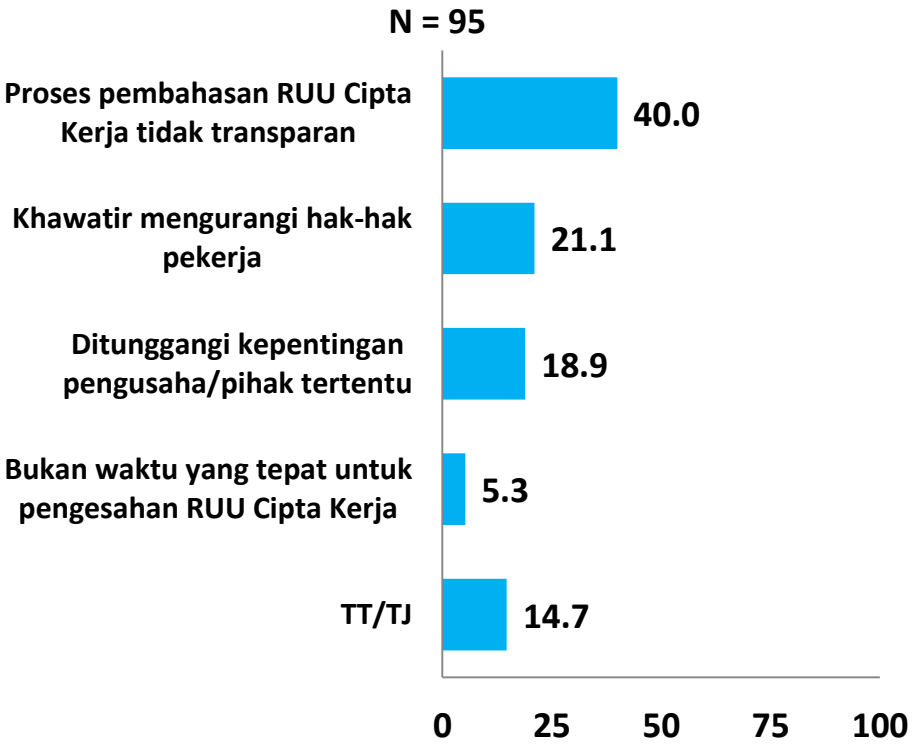
Mayoritas responden yang mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, menyatakan setuju pengesahan RUU Cipta Kerja (55.5%).

RUU Cipta Kerja:
Alasan setuju / tidak setuju pengesahan RUU Cipta Kerja

Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja? [Ditanyakan pada yang menjawab "Setuju pengesahan RUU Cipta Kerja"]



Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara tidak setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja? [Ditanyakan pada yang menjawab "Tidak setuju pengesahan RUU Cipta Kerja"]



Alasan utama responden yang mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara (60.5%). Sementara alasan utama responden yang tidak setuju pengesahan RUU Cipta Kerja adalah proses pembahasan RUU Cipta Kerja dianggap tidak transparan (40.0%).

Temuan 5

- Tingkat pengetahuan terhadap RUU Cipta Kerja relatif masih rendah. Masih banyak responden yang menyatakan belum mengerti mengenai RUU ini.

- Kendatipun demikian, pada responden yang menyatakan mengerti RUU Cipta Kerja, penilaian yang diberikan cukup baik. Terlihat harapan masyarakat terutama ditujukan agar RUU tersebut dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.



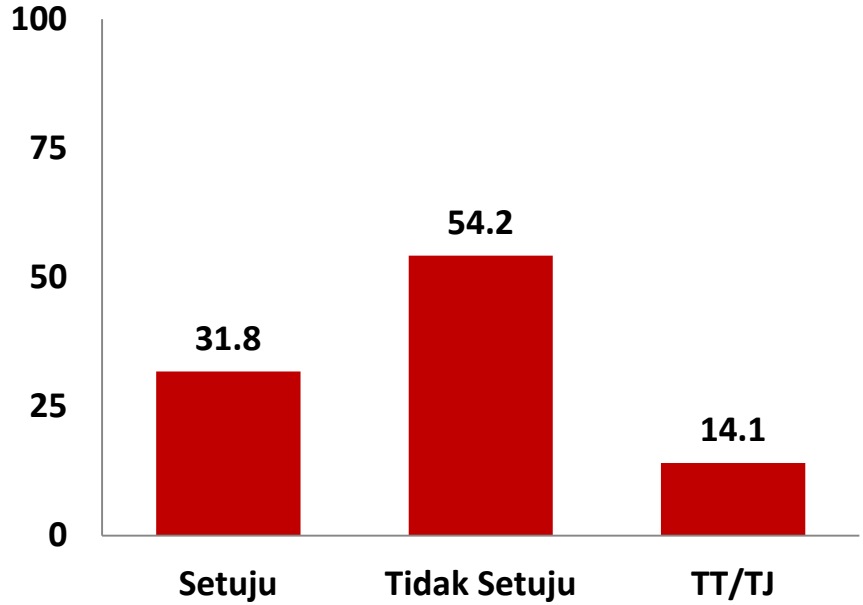
CHARTA POLITIKA
INDONESIA

SURVEI
NASIONAL

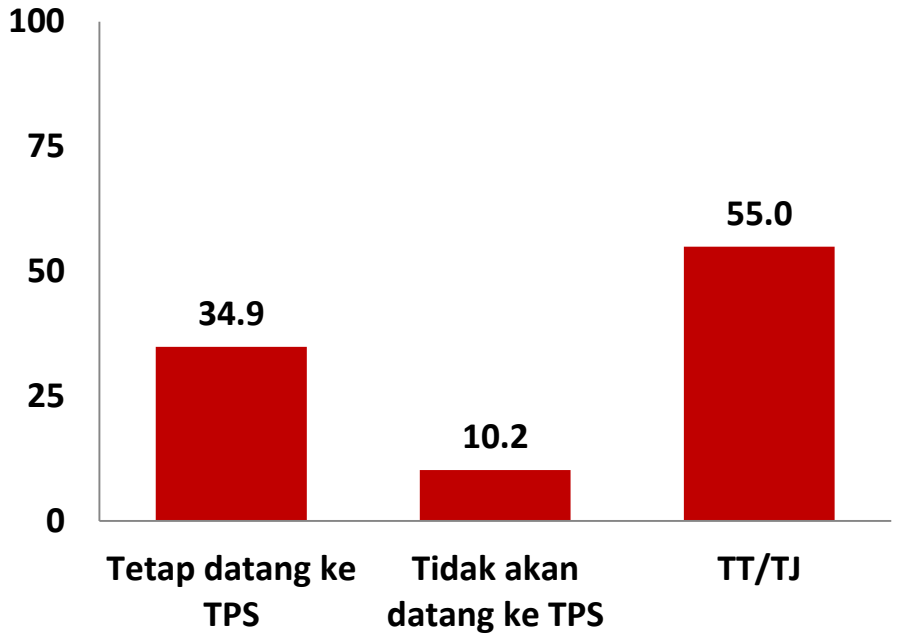
Peta Elektoral (Pilkada, Partai Politik dan Calon Presiden)

Pilkada 2020

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Pemilihan Kepala Daerah pada tahun ini tetap akan digelar menjadi tanggal 9 Desember 2020. Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju pemilihan Kepala Daerah tetap dilaksanakan disaat pandemi Covid-19 (Virus Corona) melanda Indonesia?



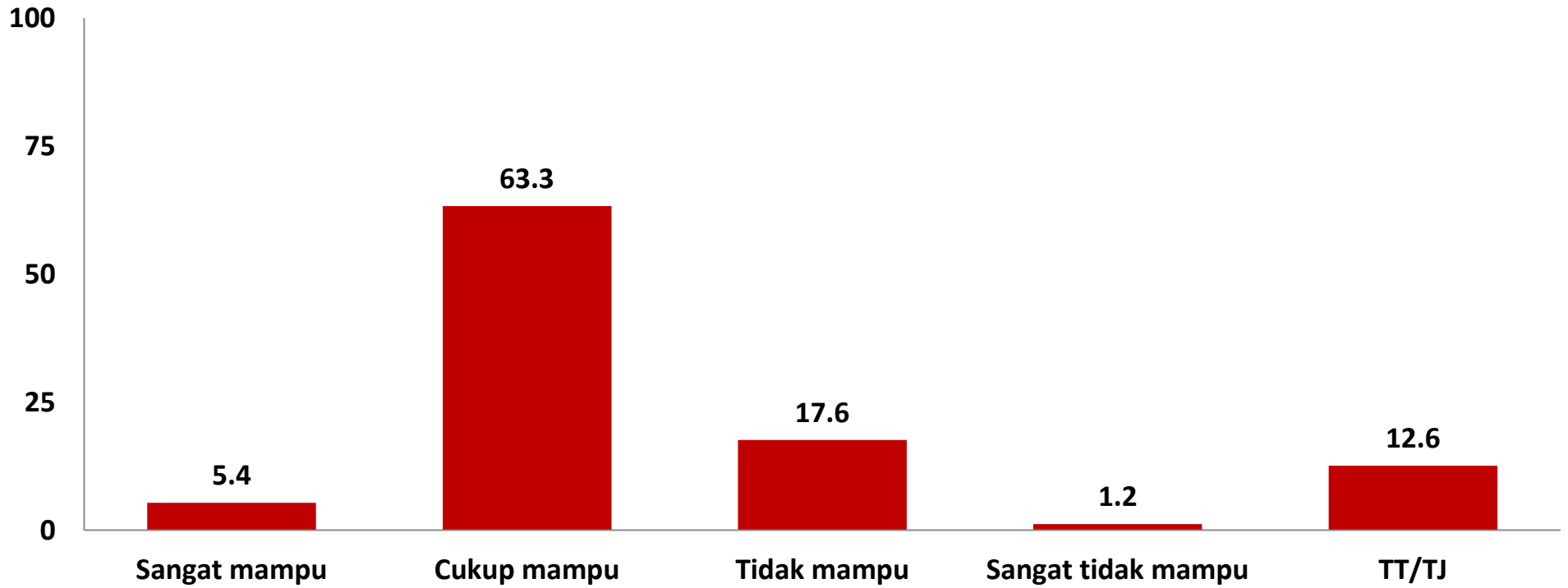
Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan tetap datang ke TPS atau tidak akan datang ke TPS pada pemilihan Kepala Daerah?



Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa Pilkada Serentak tetap diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 (54.2%). Sementara itu responden yang menyatakan akan tetap datang ke TPS pada Pilkada nanti hanya 34.9%.

Pilkada 2020 (lanj.)

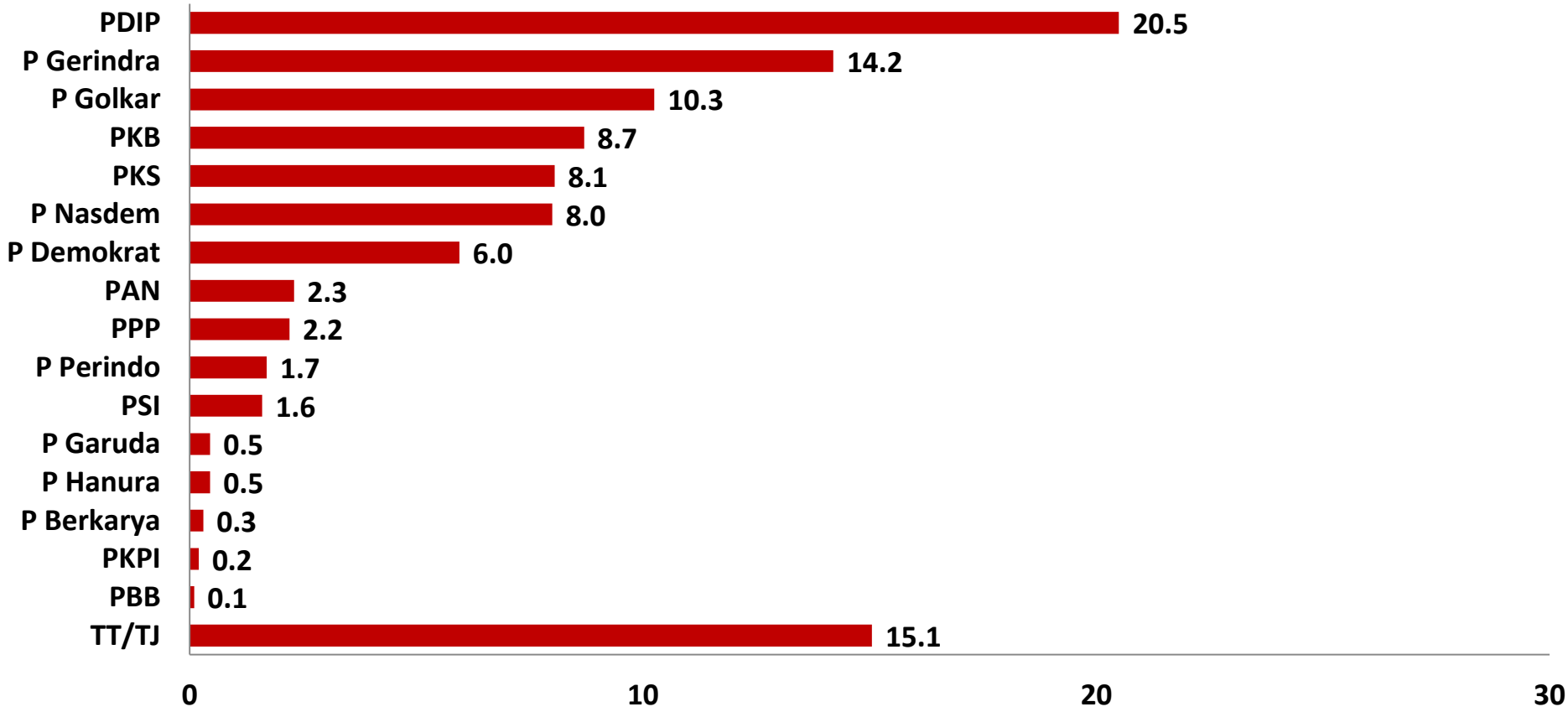
Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara seberapa mampukah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 dengan menjalankan protokol kesehatan dikarenakan Pandemi Covid-19 (virus corona) ?



Responden menilai bahwa KPUD akan mampu melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan mejalankan protokol kesehatan (jawaban sangat mampu + cukup mampu = 68.7%).

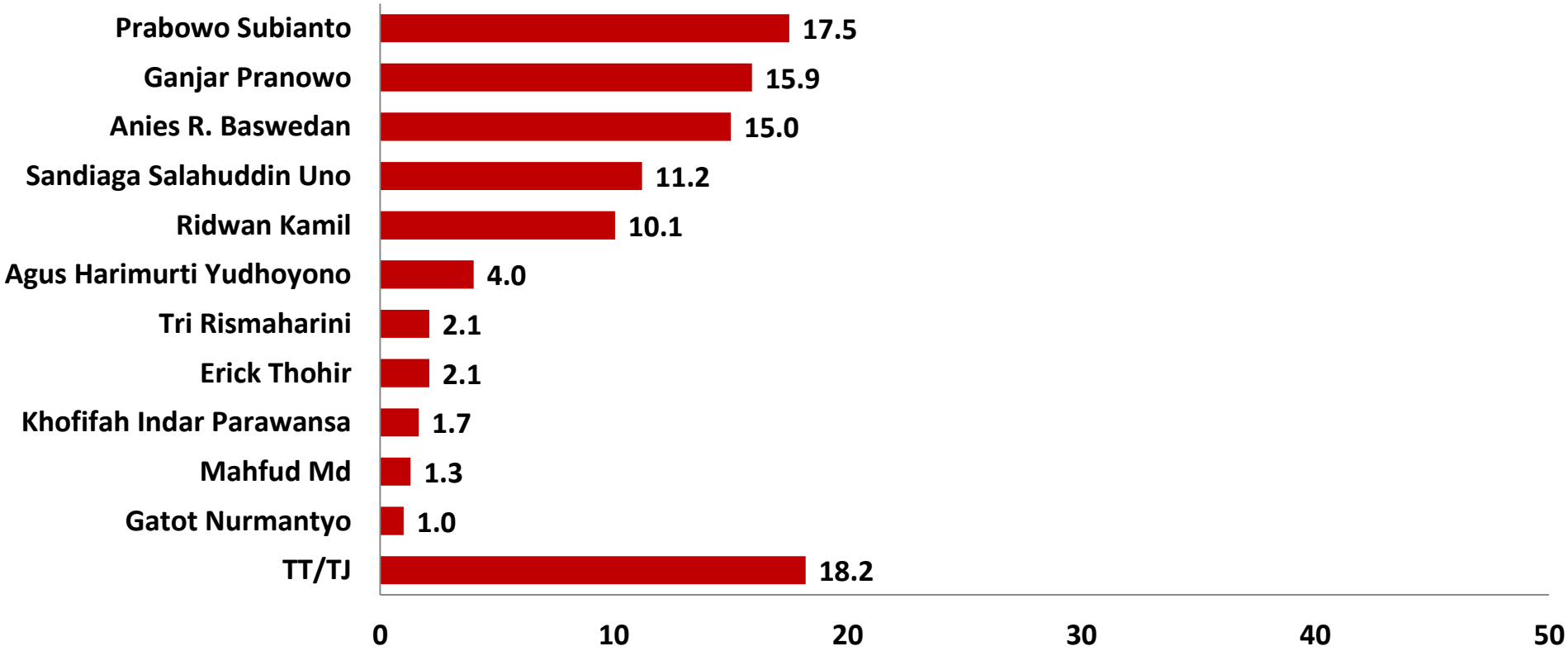
Elektabilitas Partai Politik

Jika PEMILU LEGISLATIF dilaksanakan hari ini partai politik manakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih?

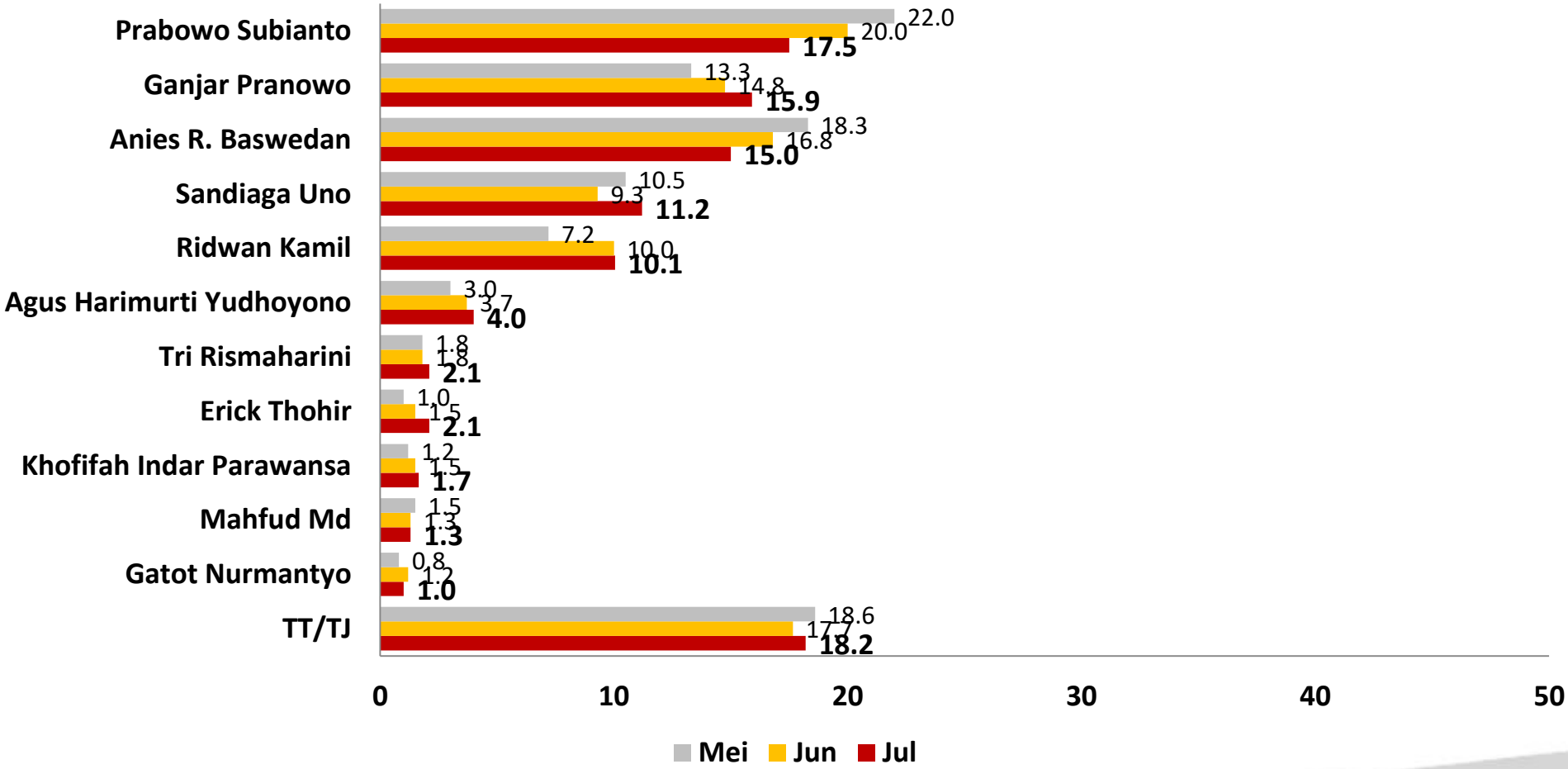


Elektabilitas Presiden

Seandainya Pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini, siapakah yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih dari nama-nama di bawah ini?



Trend:
Elektabilitas Presiden





Jl. Cisanggiri III No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta 12170, Indonesia
Phone: +62 21 7245875, 7260206, 7203976 Fax: +62 21 7397881